

repository.ub.ac.id

# **PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT KEWIRAUSAHAAN DI INDONESIA**

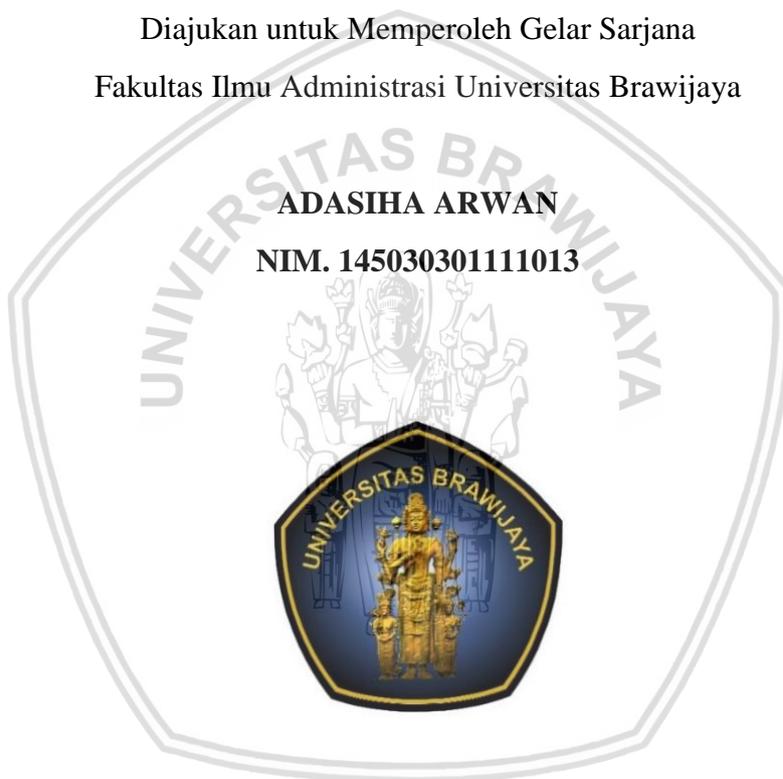
(Studi pada Program Kredit Usaha Rakyat Periode Tahun 2008-2014)

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**ADASIHA ARWAN**

**NIM. 145030301111013**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS  
MINAT KHUSUS BISNIS INTERNASIONAL  
MALANG  
2018**

**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Senin  
 Tanggal : 23 April 2018  
 Jam : 09.30-11.00  
 Skripsi atas nama : Adasiha Arwan  
 NIM : 145030301111013  
 Judul : Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Tingkat Kewirausahaan di Indonesia (Studi pada Program Kredit Usaha Rakyat Periode Tahun 2008-2014)

Dan dinyatakan **LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua

M. Kholid Mawardi., Ph.D

NIP.19751220 200501 1 002

Anggota

Aniesa Samira Bafadhal., M.AB

NIP. 2013048807062001

Anggota

Prof. Drs. Achmad Fauzi DH., MA

NIDK. 8813940017

Anggota

Supriono., S.Sos., M.AB

NIP. 2011078404271001

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKANTINGGI****UNIVERSITAS BRAWIJAYA****FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adasiha Arwan  
NIM : 145030301111013  
Jurusan/Program Studi : Administrasi Bisnis/Administrasi Bisnis  
Alamat Korespondensi : Jl. Mutiara Raya No. 24, Villa Mutiara, Sawah Baru  
Telepon : 081211678306  
E-mail : adasiha.simanjuntak@gmail.com  
Judul naskah : Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Tingkat Kewirausahaan di Indonesia (Studi pada Program Kredit Usaha Rakyat Periode Tahun 2008 – 2014)  
Konsentrasi : Bisnis Internasional

Menyatakan:

1. Sesungguhnya bahwa naskah yang saya ajukan kepada redaktur Jurnal Administrasi Bisnis telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Redaktur, dan naskah tersebut tidak mengandung unsur penjiplakan karya ilmiah (plagiarisme).
2. Apabila ternyata di kemudian hari naskah tersebut terbukti mengandung unsur penjiplakan (plagiarism), maka saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Jurnal karya ilmiah ini dapat diterbitkan / diunggah untuk kepentingan umum melalui *website* Universitas Brawijaya sesuai dengan keputusan Rektor No 308/SK/2012, perihal: Pedoman Pelaksanaan Yudisium, Penerbitan Ijazah dan Transkrip Akademik Lulusan Universitas Brawijaya, Tertanggal 9 Juli 2012.

Malang, 17 Juli 2018

Yang menyatakan,



Adasiha Arwan



## CURRICULUM VITAE

### A. DATA DIRI

Nama : Adasiha Arwan  
TTL : Tangerang, 1 Maret 1996  
Alamat : Jl. Mutiara Raya No.24  
005/02 Villa Mutiara, Sawah Baru,  
Kota Tangerang Selatan, Banten  
Nomer HP : +62 812 11678306  
Email : [adasiha.simanjuntak@gmail.com](mailto:adasiha.simanjuntak@gmail.com)  
LinkedIn : Adasiha Arwan



---

### B. PENDIDIKAN FORMAL

- Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya (2014 – 2018)
- SMA Negeri 1 Tangerang Selatan (2011 – 2014)
- SMP Negeri 3 Tangerang Selatan (2008 – 2011)
- SD Negeri Jombang 1, Tangerang Selatan (2002 – 2008)

---

### C. PENGALAMAN KERJA

- Internship Program di **DB SCHENKER**  
Departemen Relocations dan Fairs & Exhibition  
(July 2017 – Oktober 2017)

---

### D. PENGALAMAN ORGANISASI DAN KEPANITIAAN

- **Organisasi**
  1. Indonesian Future Leaders chapter Malang  
Departemen Pemberdaya Sumberdaya Manusia (2016 – 2017)
  2. Eksekutif Mahasiswa, Universitas Brawijaya  
Departemen Sosial Masyarakat (2014 – 2015)
  3. BEM Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya  
Departemen Minat dan Bakat (2014)
- **Kepanitiaan**
  1. Ngalam Youthphoria 2.0  
sebagai divisi dana usaha (2017)
  2. Olimpiade Brawijaya  
sebagai divisi acara dan *person in charge* (PIC) closing ceremony  
(2016)
  3. Welcoming International Business  
sebagai ketua pelaksana (2016)

4. IFLVersary  
sebagai divisi acara (2016)
  5. Close The Gap  
sebagai PSDM (2016)
  6. Community Development  
sebagai koordinator divisi humas dan dana usaha (2014 -2015)
  7. Earth Hour  
sebagai divisi humas (2014)
  8. Earth Day  
sebagai divisi humas (2014)
  9. Internasional Woman's Day  
sebagai divisi acara (2014)
- 

#### **E. SERTIFIKASI**

- Delegasi Universitas Brawijaya di EURO Model United Nations Maastricht, Belanda (2018)
  - Delegasi ITB Model United Nations Institut Teknologi Bandung, Bandung (2018)
  - Training Ekspor-Import Sertifikasi Level 1 (2017)
  - Finalis Brawijaya Start-Up Action 2.0 Universitas Brawijaya, Malang (2016)
- 

#### **F. KEAHLIAN**

- Microsoft Office
  - Public Relations
  - Public Speaking
  - Critical Thinking
  - Negosiasi dan Komunikasi
  - Konseptual dan Analisa
-

### ABSTRACT

*This research aims to test (1) knowing the implementation of People's Business Credit (KUR) program, (2) analyze the influence of People's Business Credit (KUR) as a government policy on entrepreneurship level in Indonesia. This type of research is an explanatory research with quantitative approach. Independent variable in this research is People's Business Credit (KUR) and dependent variable in this research is entrepreneurship level. This research uses secondary data with semester time series data from 2008 until 2014 (7 years). Data analysis techniques used in this research using simple linear regression analysis. The results of simple linear regression analysis in this research indicate that People's Business Credit (KUR) as a government policy significantly influence the level of entrepreneurship in Indonesia.*

**Keywords : Government Policy, People's Business Credit (KUR), Entrepreneurship**

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui implementasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR), (2) mengetahui pengaruh program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai wujud kebijakan pemerintah terhadap tingkat kewirausahaan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori (*Explanatory Research*) dengan pendekatan kuantitatif. Variabel independen dalam penelitian ini adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kewirausahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jangka waktu (*time series*) semester data selama 7 tahun yaitu periode tahun 2008-2014. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil analisis regresi linier sederhana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai wujud kebijakan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kewirausahaan di Indonesia.

**Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kewirausahaan**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Tingkat Kewirausahaan di Indonesia (Studi pada Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Periode Tahun 2008-2014)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis (S.AB) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Pihak-pihak yang membantu baik secara moril, materil, dan saran dalam rangka menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
2. Dr. Drs. Mochammad Al-Musadieg, MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
3. Dr. Drs. Wilopo, M.AB selaku Ketua Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
4. Mukhammad Kholid Mawardi, M.AB., Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu, memberi bimbingan, ilmu dan motivasi kepada peneliti hingga terselesaikannya skripsi ini;

5. Aniesa Samira Bafadhal, S.AB., M.AB selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu, memberi bimbingan, ilmu dan motivasi kepada peneliti hingga terselesaikannya skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang selama 3,5 tahun ini telah memberikan ilmu dan pengetahuan;
7. Orang tua tercinta peneliti yaitu H.Arwan Simanjuntak S.E dan Hj.Susilowati serta kaka peneliti Anisha Arwan M.Psi. Psikolog atas segala doa, dukungan moril, materil, motivasi, dan semangat sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Hesti dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas segala bantuan yang diberikan selama peneliti melakukan penelitian;
9. Sahabat-sahabat peneliti “Orang Baik” di Universitas Brawijaya yaitu Alm. Sigit Pradipto, Nabila, Kikuci, Made, Abdul atas segala keluh kesah, pembelajaran, semangat, dan segala kebaikan yang telah diberikan;
10. Seluruh teman-teman Bisnis Internasional 2014 khususnya Egy, Imella, Ika, Ara, Priska, Inas, Elok, Tiska, Clara, Bagus, Yanuar, Restu, Arif, Azis, Yoga atas segala pembelajaran, berproses bersama, dan kebaikan yang telah diberikan;
11. Sahabat peneliti sejak kecil yaitu Pudja Herdawati atas segala dukungan moril dan motivasi yang diberikan, serta teman-teman peneliti di

Tangsel sekaligus di Malang yaitu Sabrina, Ira, Aris, Ananda, dan Abiyu;

12. Teman-teman berproses bersama di Acara OB 2016 khususnya Satryo, Fadhil, dan Laras; IFL chapter Malang; SOSMA EM 2015; Publikasi Hore; dan Euro MUN 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas segala pembelajaran, segala pengalaman berharga, dan kebaikan yang telah diberikan;
13. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi dan selama 3,5 tahun perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian skripsi ini peneliti ciptakan, dan demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberi sumbangan yang berarti bagi segala pihak yang membutuhkan. Atas perhatian serta dukungan seluruh pihak yang terlibat, peneliti ucapkan terimakasih.

Malang, Maret 2018

Peneliti

**Adasiha Arwan**

**145030301111013**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
MOTTO .....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
RINGKASAN .....	v
SUMMARY .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kontribusi Penelitian.....	13
E. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	16
1. Obaji <i>and</i> Olugu (2014).....	16
2. Ács, Autio, Szerb (2013).....	17
3. Putra (2012).....	18
4. Simatupang, Zain, Salim, Thoyib (2009).....	19
5. Soontornthum (2007).....	21
B. Pemetaan Penelitian Terdahulu .....	22
C. Tinjauan Pustaka.....	26
1. Kebijakan Pemerintah.....	26
2. Tingkat Kewirausahaan.....	36
D. Hubungan Antar Konsep .....	45
E. Model Konseptual dan Model Hipotesis.....	47
1. Model Konseptual.....	47
2. Model Hipotesis.....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian .....	50
C. Variabel Penelitian.....	51



D. Operasionalisasi Variabel .....	52
E. Metode Pengumpulan Data.....	55
F. Teknik Analisis Data.....	55
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	56
2. Analisis Inferensial.....	56
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	62
1. Kewirausahaan di Indonesia .....	62
2. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) .....	73
3. Program KUR sebagai Manifestasi Dukungan Keuangan ( <i>Financial</i> ) bagi Wirausaha .....	76
B. Analisis Inferensial .....	86
1. Uji Asumsi Klasik .....	86
a. Uji Normalitas .....	87
b. Uji Autokorelasi .....	88
c. Uji Heteroskedastisitas .....	88
2. Analisis Regresi Linier Sederhana .....	91
3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	92
4. Uji Parsial ( $t$ ) .....	93
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	93
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	100
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	104



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov.....	104
2.	Uji Autokorelasi Durbin-Watson .....	104
3.	Uji Heteroskedastisitas .....	106
4.	Analisis Regresi Linier Sederhana .....	108



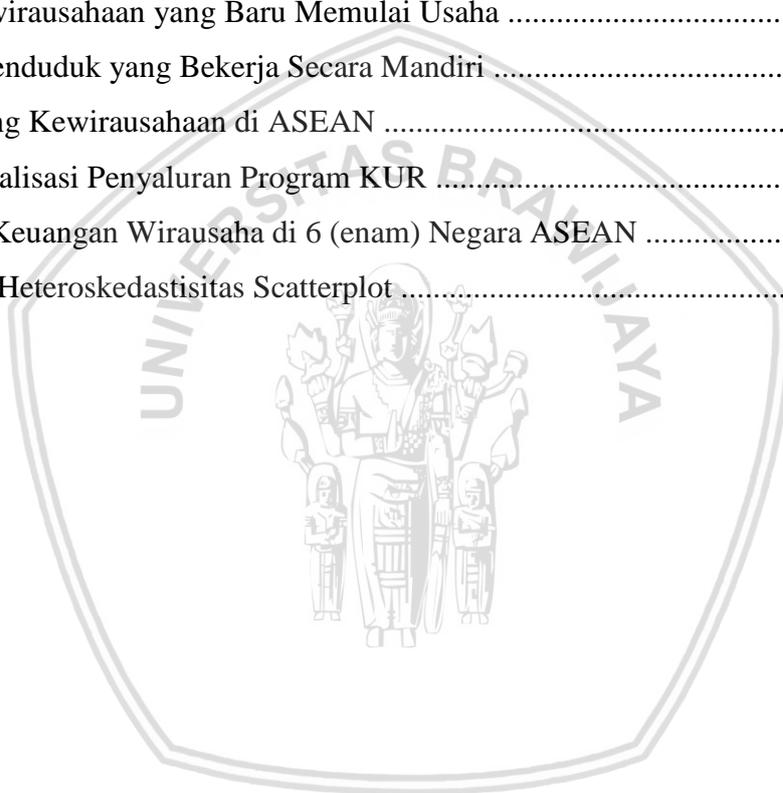
## DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1.1	Jumlah Penduduk Miskin Indonesia .....	4
2.1	Pemetaan Penelitian Terdahulu .....	23
3.1	Operasionalisasi Variabel .....	54
4.1	Tingkat Kewirausahaan di Beberapa Negara ASEAN .....	63
4.2	Jumlah Penduduk Indonesia yang Bekerja Secara Mandiri.....	70
4.3	Realisasi Penyaluran Program KUR Periode Tahun 2008-2014.....	74
4.4	Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov.....	87
4.5	Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson .....	88
4.6	Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser.....	90
4.7	Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana .....	91
4.8	Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	92



## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.1	Tingkat Pengangguran.....	5
1.2	Kontribusi Kewirausahaan dalam GDP dan Tenaga Kerja Indonesia .....	9
2.1	Model Konseptual .....	48
2.2	Model Hipotesis .....	48
4.1	Potensi Kewirausahaan di ASEAN .....	65
4.2	Total Kewirausahaan yang Baru Memulai Usaha .....	67
4.3	Jumlah Penduduk yang Bekerja Secara Mandiri .....	71
4.4	Daya Saing Kewirausahaan di ASEAN .....	72
4.5	Grafik Realisasi Penyaluran Program KUR .....	75
4.6	Masalah Keuangan Wirausaha di 6 (enam) Negara ASEAN .....	76
4.7	Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot .....	89



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sifat dasar dari kehidupan adalah selalu mengalami perubahan. Perubahan dalam arti keadaan lingkungan sekitar atau kejadian-kejadian yang ada dalam kehidupan pribadi manusia. Arti perubahan tidak selalu dalam konteks buruk, tetapi juga dalam arti perubahan yang baik. Arah perubahan baik dan buruk tergantung pada pembawa perubahan tersebut. Begitu juga dengan sifat dasar negara yang selalu melakukan perubahan seiring berjalannya waktu dengan adanya faktor-faktor eksternal dan internal. Perubahan dapat terjadi apabila ada yang memfasilitasi dan mendukung perubahan tersebut, salah satu fasilitator perubahan yaitu pemerintah.

Penelitian ini hanya akan membahas perubahan-perubahan yang terjadi dalam aspek perekonomian sebagai salah satu tugas utama pemerintah. Perubahan dalam hal perekonomian lebih dikenal sebagai pertumbuhan ekonomi. Teori Schumpeter dalam Sukirno (2012:434) menyatakan bahwa wirausaha memiliki peranan penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Teori Schumpeter dalam Irawan dan Suparmoko (2012:44) menjelaskan bahwa salah satu dasar pertumbuhan ekonomi berasal dari perubahan-perubahan dalam selera konsumen namun perubahan tersebut bersifat gradual atau sedikit demi sedikit. Faktor paling berpengaruh dalam

perubahan ekonomi menurut Schumpeter dalam Irawan dan Suparmoko (2012:44) disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan dalam lapangan industri dan perdagangan. Berdasarkan teori Schumpeter pada Sukirno (2012:434) hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan masyarakat yang terus berkembang. Oleh sebab itu, pemenuhan kebutuhan tersebut bisa dijadikan sumber perekonomian dengan meningkatkan produktivitas negara.

Meningkatkan produktivitas negara merupakan upaya dalam mengembangkan perekonomian negara. Irawan dan Suparmoko (2012:42) menyatakan bahwa suatu negara secara umum mengalami 5 tingkat perkembangan ekonomi, yaitu : (1) Negara ditetapkan sebagai negara pemula dan impor kapital yang disebut sebagai debitur yang belum mapan (*immatured-debtor*). (2) Negara mulai membayar pinjaman yang digunakan sebagai dasar pembangunan sebelumnya. (3) Setelah negara sudah bisa membayar utang sebelumnya dan bisa membiayai kegiatan perekonomian sendiri, negara meminjamkan ke negara lain yang membutuhkan. Pada tahap ini disebut sebagai tingkat debitur yang sudah mapan (*matured-debtor*). (4) Negara sudah mendapatkan dividen dan bunga yang lebih besar daripada yang dibayarkan (surplus). Keadaan ini disebut sebagai tingkat kreditur yang belum mapan (*immatured creditor*). (5) Tahap terakhir adalah negara hanya menerima dividen dan bunga yang berasal dari pinjaman negara lain, tahap ini disebut tingkat kreditur yang sudah mapan (*matured creditor*).

Berdasarkan pernyataan Irawan dan Suparmoko (2012) mengenai 5 (lima) tingkat perkembangan ekonomi, berdasarkan pada kondisi Indonesia saat ini,

Indonesia dalam tahap ke-2 (dua) yaitu negara mulai membayar pinjaman yang digunakan sebagai dasar pembangunan sebelumnya. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki populasi sebesar 260.581.000 jiwa dengan GDP US\$ 943.550.000 tercatat pada tahun 2016 di *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) yang masih memiliki permasalahan sosial ekonomi yang kompleks. Permasalahan sosial dan ekonomi di Indonesia masih dalam tingkat yang terbilang tinggi dibandingkan negara lain. Permasalahan-permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi Indonesia adalah kelaparan, rendahnya tingkat kualitas pendidikan, penyaluran sumberdaya yang tidak merata, struktur dan infrastruktur yang belum memadai, tingkat kriminalitas tinggi yang disebabkan oleh pengangguran dan kemiskinan (Agustina, 2015: 6).

Tingginya tingkat permasalahan ekonomi suatu negara akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tersensus ada 27.770.000 jiwa penduduk miskin terhitung Maret 2017, jumlah ini masih terbilang lebih sedikit dibandingkan Maret 2012 yaitu 29.130.000 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.1 sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Presentase Penduduk Miskin (%)
Maret 2012	29.130.000	11,96
September 2012	28.590.000	11,66
Maret 2013	28.070.000	11,37
September 2013	28.550.000	11,47
Maret 2014	28.280.000	11,25
September 2014	27.730.000	10,96
Maret 2015	28.590.000	11,22
September 2015	28.510.000	11,13
Maret 2016	28.010.000	10,86
September 2016	27.760.000	10,70
Maret 2017	27.770.000	10,64

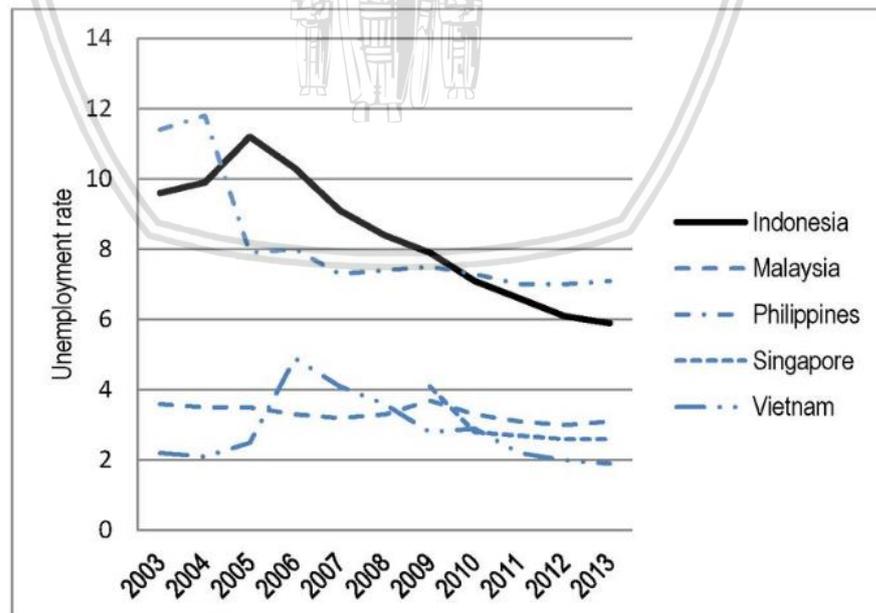
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2017

Mengutip dari berita CNN Indonesia yang berjudul “*Jumlah Penduduk Miskin Berkurang, tapi Kesenjangan Tinggi*” ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), 2017) dalam berita tersebut dapat dikutip perkataan Suhariyanto (2017) sebagai Kepala BPS, Selasa (3/1) yaitu “Ini tantangan bagi pemerintah. Persoalan besar ini yang kita hadapi dan tidak berubah. Masih ada disparitas kemiskinan dan penduduk miskin masih lebih banyak di pedesaan,”.

Berdasarkan data jumlah penduduk miskin Indonesia Tabel 1.1, adanya penurunan tingkat kemiskinan dari Maret 2016 yaitu 28.010.000 jiwa menjadi 27.770.000 jiwa pada Maret 2017, fakta tersebut merupakan gejala positif. Namun menimbulkan masalah lain yaitu masih ada kesenjangan yang tinggi antara penduduk kota dan penduduk desa, ditambah lagi mayoritas kemiskinan berasal dari penduduk desa. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada penyebaran sumberdaya dan pembangunan berkelanjutan yang menyeluruh. Berdasarkan kutipan perkataan Suhariyanto (2017) dapat disimpulkan bahwa permasalahan

kemiskinan merupakan salah satu tugas besar pemerintah ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), 2017).

Kemiskinan yang terjadi didasarkan oleh seseorang yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Tingkat pengangguran sangat berhubungan dengan tingkat kemiskinan, apabila tingkat pengangguran suatu negara tinggi secara tidak langsung tingkat kemiskinan negara tersebut juga tinggi. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah sebagai pengelola formal negara adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Salah satu cara mengurangi tingkat kemiskinan ialah dengan mengurangi tingkat pengangguran. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi dibanding negara lain di Asia, sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1 berikut :



**Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran**

Sumber : Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2016

Tahun 2005 Indonesia masih memiliki tingkat pengangguran yang tinggi dibandingkan negara-negara Asia lainnya yaitu Singapura, Malaysia dan Vietnam. Namun bila diperhatikan lebih lanjut, Gambar 1.1 menunjukkan hal positif lainnya yaitu ada penurunan tingkat pengangguran mulai tahun 2005 sampai dengan 2013.

Menurut Suhariyanto (2017) pemerintah sudah memiliki program untuk membangun desa tertinggal yaitu pemberian dana desa dengan program-program seperti pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pembangunan infrastruktur. Namun praktik dan dampak yang terjadi tidak terlalu signifikan. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, masyarakat membutuhkan upaya yang lebih signifikan dan berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya signifikan yang dapat langsung dirasakan yaitu mengembangkan lebih banyak kewirausahaan dalam negeri.

Baumol (1990) dalam Minniti (2008:781) mengatakan bahwa kewirausahaan dapat dikatakan konstan dalam masyarakat, kontribusi kewirausahaan dalam negara adalah mengadakan produktivitas dengan beberapa aktivitas seperti inovasi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah sebagai institusi terikat dapat mengatur alokasi kewirausahaan yang lebih efektif (Baumol, 1990; Bowen *and* De Clercq, 2008). Adanya kewirausahaan memerlukan konteks institusi secara spesifik dalam mengatur alokasi pembangunan yang merata dalam setiap daerah (Wagner *and* Sternberg, 2004 dalam Minniti, 2008:781).

Kewirausahaan dibedakan tergantung pada daerah yang signifikan seperti daerah pedalaman, daerah berteknologi maju, ataupun daerah metropolitan. Maka dari itu, sebuah kebijakan diatur berbeda dari setiap daerah berdasarkan pada kondisi daerah tersebut, seperti sumberdaya, jaringan, dan kemampuan pasar. Berdasarkan perbedaan tersebut, kebijakan kewirausahaan berpedoman pada pemerintah, diantaranya adalah keuangan, pajak, regulasi perdagangan, dan aktivitas peningkatan inovasi (Minniti, 2008:782)

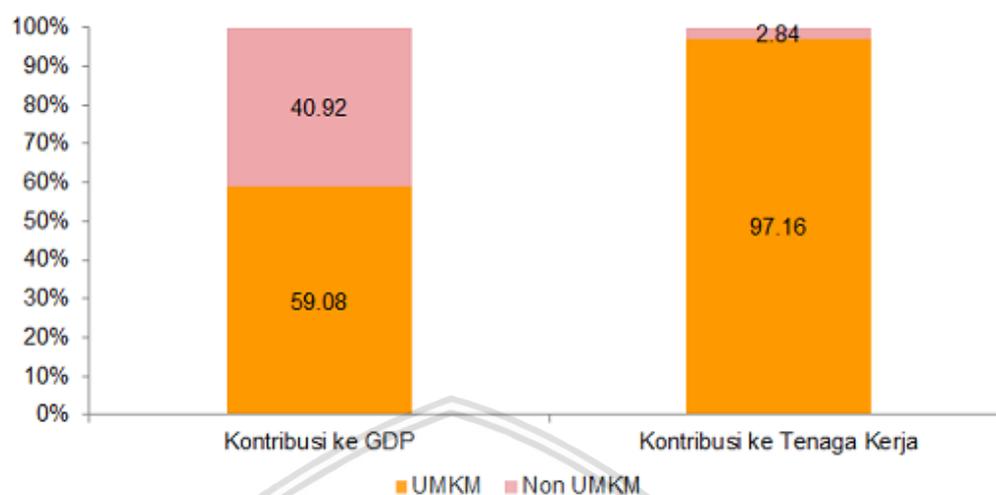
Menurut Burch (1986) dalam Lupiyoadi (2004:39) mengatakan bahwa meningkatnya jumlah kewirausahaan dalam negeri dapat menyelesaikan beberapa permasalahan yaitu, mengurangi tingkat pengangguran karena kewirausahaan akan membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan infrastruktur daerah sekitar lokasi dibangunnya usaha baru tersebut, secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dengan meningkatnya pendapatan per-kapita dan meningkatnya tingkat produktivitas. Selain itu, kewirausahaan juga memiliki manfaat lain seperti transfer teknologi, pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, meningkatnya tingkat ekspor-impor (permintaan dan penawaran) suatu negara (Agustina, 2015:6).

Menurut Schumpeter dalam Irawan dan Suparmoko (2012:44), berproduksi adalah mengelola sumberdaya yang dimiliki atau yang dapat dicapai dengan menghasilkan barang baru ataupun barang lama dengan metode yang berbeda. Berproduksi atau produktivitas adalah suatu dasar yang memiliki pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini lebih baik daripada kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini (Sinungan, 2005:16). Schumpeter mengatakan bahwa

inovasi dapat berbentuk lima hal, yaitu : (1) Mengenalkan barang-barang baru atau berkualitas baru yang belum dikenal oleh masyarakat, (2) Mengenalkan metode produksi baru, (3) Membuka pasar baru bagi perusahaan, (4) Menemukan sumber perekonomian baru, (5) Membangun industri baru dalam sebuah industri. Masyarakat yang berani melakukan inovasi ini disebut sebagai wirausaha (*Entrepreneur*) (Sukirno, 2012:434).

Schumpeter mengatakan bahwa inovasi yang dilakukan oleh adanya kegiatan kewirausahaan merupakan sebuah keharusan yang akan mempengaruhi sektor ekonomi sebuah negara (Sukirno, 2012:435). Salah satu tugas utama pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya adalah membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas perekonomian, meningkatkan pendapatan per kapita, mengalokasikan sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki negara dengan efektif dan efisien (Agustina,2015:83).

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan berpotensi dalam hal kewirausahaan, hal ini dapat dibuktikan bahwa bidang kewirausahaan memiliki dampak positif terhadap tingkat GDP Negara Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam *website* resmi Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia. Berikut digambarkan distribusi kewirausahaan dalam GDP dan tenaga kerja di Indonesia pada Gambar 1.2 :



**Gambar 1.2 Kontribusi Kewirausahaan dalam GDP dan Tenaga Kerja Indonesia**

Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia (2012)

Berdasarkan fakta besarnya peran kewirausahaan dalam pengembangan perekonomian suatu negara, sudah semestinya pemerintah sebagai pengelola negara dapat membuat kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan kewirausahaan di Indonesia. Semenjak pemerintahan orde baru, pemerintah sudah memiliki kebijakan tentang kewirausahaan seperti program Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Canda Kulak (KCK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), namun dalam menjalankan program-program tersebut hasil yang ditimbulkan adalah kesenjangan sosial lainnya. Terdapat 200 konglomerat Indonesia telah menguasai 80% kehidupan ekonomi dan jumlah uang yang beredar di Indonesia (Marbun, 1996:24).

Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam kebijakan pembiayaan kewirausahaan (Harrison, Mason, and Girling, 2004:308). Pemerintah telah berupaya melakukan pembiayaan atau kebijakan memberikan

modal kepada kewirausahaan seperti jaminan kredit bersama dan skema keuangan mikro (*Microfinance*) untuk pinjaman bank tradisional. Jaminan kredit bersama memiliki keuntungan yaitu mengurangi biaya transaksi. Sedangkan skema keuangan mikro memiliki keuntungan yaitu menghindari risiko keuangan peminjam dengan memilih persyaratan agunan yang dipenuhi oleh akuntabilitas non-moneter berdasarkan pada mekanisme penegakan reputasi atau kelompok kecil (Khoja *and* Lutafali, 2008:1).

Indonesia memiliki kebijakan pemerintah dalam hal pembiayaan kewirausahaan yang bernama program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan UU No. 20 tentang mengatasi kurangnya akses kewirausahaan untuk memperoleh kredit atau pembiayaan. Memiliki mekanisme adanya alokasi dana kepada bank-bank di seluruh Indonesia dengan regulasi masyarakat bisa meminjam dana kepada bank untuk membangun sebuah usaha dan peran pemerintah adalah menjamin bunga pinjaman yang berasal dari Bank. Realisasi program Kredit Usaha Rakyat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Kredit Usaha Rakyat Ritel.

Tahun 2007 sampai dengan 2014 realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki rata-rata yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar Rp. 20 triliun per tahun dengan total Rp. 100 triliun dalam kurun waktu 5 tahun. Dinyatakan pada Permenko 6 tahun 2015 sektor yang akan dibiayai KUR hanya pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan sektor perdagangan yang sesuai dengan sektor-sektor tersebut. Program Kredit Usaha Rakyat termasuk kedalam peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana keputusan

yang diberikan Permenko No. 6 Tahun 2015 dan No. 8 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan KUR, dan perubahan pada Permenko No. 13 Tahun 2015.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki 2 (dua) skema yang berbeda yaitu pada tahun 2007 sampai 2014 menggunakan skema Imbal Jasa Pinjaman (IJP) dan 2015 sampai saat ini menggunakan skema subsidi bunga. Perubahan skema yang terjadi karena adanya evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai pemilik dan pengelola kebijakan untuk memastikan ketepatan sasaran program. Oleh karena itu, dampak yang dirasakan adalah adanya perubahan jumlah penyaluran dana dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2007-2014 dibandingkan 2015-2017.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Obaji *and* Olugu (2014) bahwa tingkat kesuksesan wirausaha di beberapa negara sudah terbukti dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Bahkan beberapa pemerintahan negara berkembang saat ini berfokus pada program-program peningkatan kewirausahaan termasuk Indonesia yang berfokus pada aspek infrastruktur, keuangan, dan kebijakan fiskal. Hasil penelitian Putra (2012) dapat mendukung pernyataan tersebut dengan adanya 6 (enam) hasil identifikasi faktor yang menentukan minat mahasiswa menjadi wirausaha yaitu: faktor lingkungan, faktor harga diri, faktor peluang, faktor kepribadian, faktor visi, faktor pendapatan dan percaya diri. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah masuk ke dalam faktor lingkungan dan dapat mempengaruhi faktor peluang, faktor kepribadian, dan faktor pendapatan.

Kondisi perekonomian negara termasuk kebijakan pemerintah merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi masyarakat untuk menjadi

wirausaha, seperti yang telah dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya dan penelitian Putra (2012). Penelitian Ács, Autio, Szerb (2013) menguji dampak sebuah program pengembangan kewirausahaan terhadap peningkatan kewirausahaan dalam negara dan menghasilkan peringkat negara-negara yang memiliki potensi dalam peningkatan kewirausahaan menggunakan GEDI indeks karena memiliki faktor pemasukan perekonomian negara yang sedang berkembang dan kualitas institusional yang sedang berkembang.

Berbeda dengan hasil dari penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, hasil penelitian Simatupang, Zain, Salim, Thoyib (2009) menyatakan kebijakan pemerintah terhadap tingkat wirausaha tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas teori Schumpeter apakah adanya hubungan signifikan kebijakan pemerintah terhadap Tingkat Kewirausahaan yang dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti memutuskan untuk mengambil judul **“Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Tingkat Kewirausahaan di Indonesia (Studi pada Program Kredit Usaha Rakyat Periode Tahun 2008-2014)”**.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia ?
2. Bagaimana program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai wujud kebijakan pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kewirausahaan di Indonesia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
2. Untuk mengetahui pengaruh program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai wujud kebijakan pemerintah terhadap tingkat kewirausahaan di Indonesia.

## **D. Kontribusi Penelitian**

1. Kontribusi Praktis
  - a. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini menjadi rujukan dan sumber informasi serta pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait kewirausahaan.
  - b. Bagi masyarakat umum, diharapkan penelitian ini menjadi bahan pertimbangan untuk pengambil keputusan terkait berwirausaha.

## 2. Kontribusi Akademis

- a. Bagi akademisi selanjutnya, diharapkan penelitian ini menjadi referensi pembelajaran mengenai pengaruh program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai wujud kebijakan pemerintah Indonesia terhadap tingkat kewirausahaan di Indonesia ataupun bidang lain yang relevan, serta memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.
- b. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini menjadi bahan pembelajaran terhadap penelitian berikutnya sehingga menjadi lebih baik dimasa mendatang.

### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan diperlukan untuk memahami isi dalam penelitian ini, adapun susunan sistematika pembahasan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan yang digunakan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian, landasan teori yang mendukung penelitian. Selanjutnya diuraikan konsep penelitian dan dirumuskan hipotesis sehingga mendapatkan kerangka penelitian teoritis yang melandasi penelitian ini.

### BAB III : METODE PENELITIAN

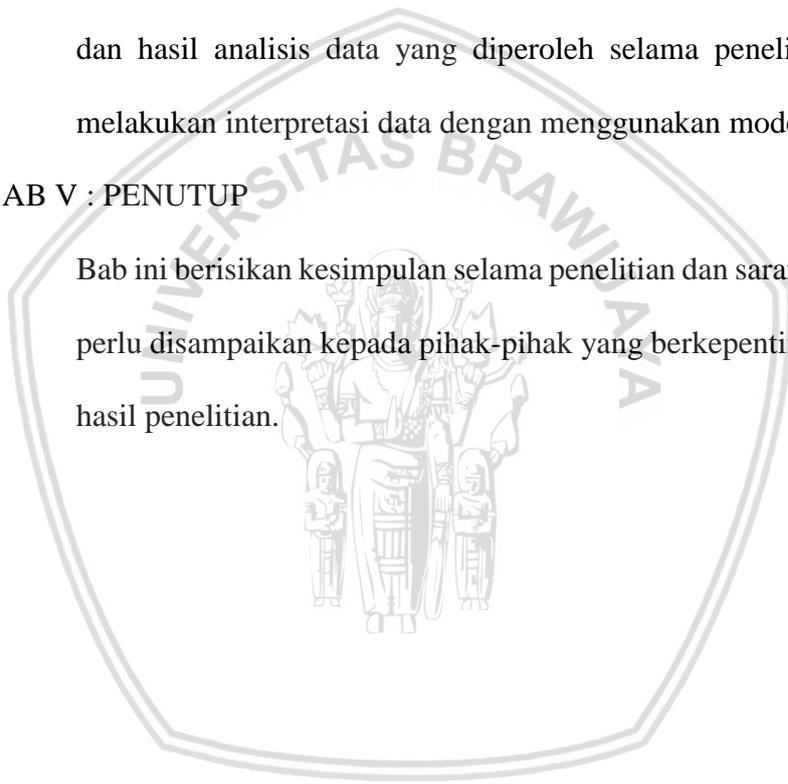
Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel, definisi operasional, data penelitian, sumber data dan metode pengolahan data, teknik analisis data, dan uji hipotesis.S

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang teknik pengolahan data, analisis data, dan hasil analisis data yang diperoleh selama penelitian dengan melakukan interpretasi data dengan menggunakan model tertentu.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan selama penelitian dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah pedoman bagi penulis dalam melakukan penyusunan penelitian. Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan referensi atau gambaran penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi penulis adalah beberapa penelitian yang memiliki konsep yang sesuai atau relevan dengan penelitian ini, yaitu kebijakan pemerintah dan kewirausahaan.

##### 1. Obaji and Olugu (2014)

Penelitian ini berjudul "*The Role of Government Policy in Entrepreneurship Development*". Penelitian ini membahas tentang peran konseptual pemerintah terhadap pengembangan kewirausahaan dan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penelitian ini memiliki 3 (tiga) variabel utama yaitu: kewirausahaan, kebijakan pemerintah dan pembangunan ekonomi.

Tujuan penelitian ini adalah memperjelas peran wirausaha, kebijakan pemerintah, dan dampaknya pada pertumbuhan perekonomian suatu negara, serta hubungan yang dimiliki dari setiap variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data kuesioner. Penelitian ini menggunakan teknik

pengolahan data berupa pendekatan *Structural Equation Modeling (SEM)* dan *Partial Least Squares (PLS)*.

Penelitian ini memiliki 2 (dua) hipotesis. Pertama, adanya hubungan positif antar kewirausahaan dan pembangunan ekonomi. Kedua, adanya intervensi pemerintah dalam peningkatan kewirausahaan dan pertumbuhan perekonomian. Hasil dari penelitian ini adalah beberapa negara menempatkan kewirausahaan sebagai dasar dari adanya industrialisasi ekonomi. Salah satu saran dari penelitian ini adalah menghentikan subsidi pembentukan *start-up* generik, dan sebagai gantinya, subsidi tersebut diberikan kepada bisnis yang memang terlihat sedang berkembang. Alokasi dana yang tepat sasaran, akan memberikan dampak secara langsung kepada perkembangan perekonomian negara.

## 2. Ács, Autio, Szerb (2013)

Penelitian ini berjudul “*National Systems of Entrepreneurship: Measurement Issues and Policy Implications*”. Tujuan penelitian ini adalah mengenalkan konsep dari “*National Systems of Entrepreneurship*” dengan penjelasan karakteristik dari program tersebut. Penelitian ini menjelaskan pemahaman kewirausahaan dalam skala individu dan negara. Penelitian ini menguji seberapa besar dampak sebuah program pengembangan kewirausahaan terhadap tingkat minat wirausaha individu dan peningkatan kewirausahaan di dalam sebuah negara.

Penelitian ini memiliki 3 bentuk pendekatan yang digunakan dalam mengukur kewirausahaan di sebuah negara, yaitu : Pengukuran hasil (*Output Measures*), Pengukuran tindakan (*Attitude Measures*), Pengukuran kerangka kerja (*Framework Measures*). Penelitian ini memiliki 2 (dua) objek yaitu wirausaha individual dan institusional. Berdasarkan kedua objek tersebut, masing-masing memiliki indikator penelitian.

Penelitian ini menghasilkan peringkat negara-negara yang memiliki potensi dalam peningkatan kewirausahaan, menggunakan GEDI indeks dan 88 negara sebagai sampel. Penelitian menghasilkan Amerika sebagai negara pertama, di ikuti Australia, dan beberapa negara yang memiliki angka yang tinggi dalam potensi kewirausahaan yaitu Swedia, Denmark, Finland, Iceland, dan Norwegia. Negara-negara tersebut memiliki potensi kewirausahaan karena memiliki pemasukan perekonomian negara yang sedang berkembang dan memiliki kualitas institusional. Penelitian ini juga meneliti sensitifitas tingkat kewirausahaan terhadap faktor-faktor penghambat dengan sampel negara Amerika, Jepang, dan India.

### 3. Putra (2012)

Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor Penentu Minat Mahasiswa Manajemen untuk Berwirausaha”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor penentu mahasiswa untuk berwirausaha. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa manajemen laki-laki dan

perempuan dengan sampel penelitian adalah mahasiswa manajemen fakultas ekonomi Universitas Negeri Padang yang pernah mengambil mata kuliah kewirausahaan. Pengambilan sampel penelitian ini adalah *Accidental Sampling*.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, data primer yang digunakan adalah pengisian kuesioner dan wawancara dengan responden yang sudah ditentukan, sedangkan data sekunder yang digunakan merupakan data yang di peroleh dari hasil analisis yang bersumber dari artikel maupun majalah. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk berwirausaha yaitu faktor lingkungan, faktor harga diri, faktor peluang, faktor pribadi, faktor visi, faktor pendapatan dan percaya diri. Hasil penelitian ini membuktikan faktor-faktor penentu mempengaruhi mahasiswa menjadi berwirausaha yang memiliki validitas dengan indikator-indikator tertentu, yaitu : dorongan saudara, pola pikir orang tua, menjaga gengsi, pekerjaan orang tua, harga diri, peluang, percaya diri, dan kemampuan kewirausahaan.

#### **4. Simatupang, Zain, Salim, Thoyib (2009)**

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kebijakan Pemerintah, Kewirausahaan (*Entrepreneur*) terhadap Produktivitas Usaha dan Keberlanjutan (*Sustainability*) Pekebun Kecil pada Industri Kelapa Sawit di Provinsi Riau (Studi pada Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi

Riau)". Penelitian ini menggunakan metode eksplanasi (*Level of explanation*) dengan pengujian hipotesis menggunakan skala *Likert*.

Variabel-variabel yang diteliti merupakan kebijakan pemerintah di sektor perkebunan ( $X_1$ ) terhadap kewirausahaan ( $Y_1$ ), produktivitas ( $Y_2$ ) dan keberlanjutan ( $Y_3$ ) menggunakan analisis *Structural Equation Modelling* (SEM). Penelitian ini menggunakan variabel kebijakan pemerintah dengan indikator kepastian hukum, lingkungan hidup dan pajak ekspor CPO.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap tingkat wirausaha tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Terutama dalam hal kebijakan pemerintah yaitu pinjaman ke bank dalam bentuk pinjaman komersil untuk pengembangan kebunnya. Berdasarkan keyakinan pekebun kecil pada masa depan perkembangan kebunnya, banyak petani yang mencoba melakukan pinjaman ke bank dalam bentuk pinjaman komersil.

Saat pengajuan pinjaman, tidak semua pengaju berhasil karena pihak yang meminjamkan yaitu bank merasa kemampuan pengelolaan usaha yang petani miliki masih lemah, serta pengelolaan sumber daya yang masih lemah mengakibatkan adanya ketidakpercayaan pihak bank terhadap petani. Hal tersebut akan berakibat kurang baik bagi pekebun kecil yang *over confidence*. Hal tersebut berakibat pada ketidakpercayaan dan apatis pihak petani terhadap setiap kebijakan pemerintah yang dikeluarkan.

Dominasi pendidikan petani kelapa sawit adalah lulusan SLTA, yang menunjukkan bahwa pelaku-pelaku bisnis tersebut yang dikatakan sebagai wirausaha tidak memiliki latar belakang pendidikan kewirausahaan yang memadai, tetapi masih memiliki sifat dasar wirausaha yaitu ingin mengembangkan usahanya menjadi lebih maju (inovatif). Saran dalam penelitian ini yaitu pemerintah dapat menjadi penyelenggara pendidikan manajemen yang memadai sehingga dapat mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki.

#### 5. Soontornthum (2007)

Penelitian ini berjudul "*The Effects of Government Assistance on The Entrepreneurs' Intention to Internationalize : an Empirical Study of Thai Entrepreneurs in Food Business*". Penelitian ini membahas tentang karakteristik wirausaha, karakteristik perusahaan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi ketika sebuah bisnis mulai memasuki pasar internasional, bentuk dukungan dan layanan pemerintah dalam pengambilan keputusan seseorang sehingga menjadi seorang wirausaha.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu interview dan kuesioner. Penelitian ini melakukan interview dengan 2 (dua) wirausaha dan 2 (dua) karyawan pemerintahan, serta penyebaran kuesioner sebanyak 400 kuesioner kepada wirausaha-wirausaha yang bergabung dengan "*The Global Kitchen Program*" dan wirausaha yang

tertarik untuk membuka restoran diluar Negara Thailand. Pengolahan data menggunakan skala *5-point* Likert dengan metode analisis *z-test*, *ANOVA*, dan analisis regresi berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan seberapa besar dukungan pemerintah dalam meningkatkan kapabilitas dan kepercayaan diri wirausaha dalam proses memasuki pasar internasional. Semua aspek tersebut didapatkan dari seminar dan *workshop* yang diselenggarakan oleh pemerintah, namun dirasa masih bersifat umum (*general*) oleh wirausaha yang mengikutinya. Berdasarkan interview lebih mendalam dari penelitian ini bahwa jaringan-jaringan internasional yang diberikan oleh pemerintah adalah hal yang lebih efektif.

#### **B. Pemetaan Penelitian Terdahulu**

Pemetaan penelitian terdahulu bertujuan untuk mempermudah peneliti dan pembaca untuk memahami arah penelitian ini. Pemetaan penelitian terdahulu berguna untuk memahami relevansi dan alasan peneliti menggunakan penelitian-penelitian terdahulu yang dimasukkan kedalam penelitian ini. Agar memudahkan pembaca dan peneliti, berikut pemetaan penelitian terdahulu pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Pemetaan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
1.	Obaji and Olugu (2014)	<i>The Role of Government Policy in Entrepreneurship Development</i>	1. Kebijakan Pemerintah (X) 2. Kewirausahaan (Y <sub>1</sub> ) 3. Pembangunan Ekonomi (Y <sub>2</sub> )	a) Metode penelitian kuantitatif b) Teknik pengumpulan data : kuesioner c) Pendekatan dan teknik pengolahan data : <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM) dan teknik <i>Partial Least Squares</i> (PLS)	Tingkat kesuksesan kewirausahaan Di beberapa negara sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Beberapa negara berkembang saat ini berfokus pada program-program dalam aspek : infrastruktur, keuangan, dan kebijakan fiskal.
2.	Ács, Autio, Szerb (2013)	<i>National Systems of Entrepreneurship : Measurement Issues and Policy Implications</i>	1. <i>National Systems of Entrepreneurship</i> (X) 2. Proses Kewirausahaan (Y)	a) Metode penelitian kuantitatif b) Menggunakan data sekunder c) Sumber data sekunder : GEM dan GEDI	Setiap indikator yang dijelaskan dalam penelitian ini memiliki kekuatan dan faktor penghambat yang sama. Dibeberapa negara setiap komponen sistem tersebut memiliki keterkaitan, dan biaya untuk meningkatkan kinerja setiap indikatornya bisa beragam.

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
					Analisis GEDI ini bisa dijadikan sebagai <i>starting point</i> dalam analisis kebijakan.
3.	Putra (2012)	Faktor-faktor Penentu Minat Mahasiswa Manajemen untuk Berwirausaha	Faktor-faktor yang Menentukan Minat Mahasiswa Manajemen untuk Berwirausaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Jenis penelitian deskriptif</li> <li>b) Pengambilan sampel dengan teknik <i>Accidental Sampling</i></li> <li>c) Menggunakan analisis faktor</li> </ul>	Ada 6 (enam) hasil identifikasi faktor yang menentukan minat mahasiswa manajemen untuk berwirausaha yaitu: (1) faktor lingkungan (2) faktor harga diri (3) faktor peluang (4) faktor kepribadian (5) faktor visi (6) faktor pendapatan dan percaya diri
4.	Simatupang, Zain, Salim, Thoyib (2009)	Pengaruh Kebijakan Pemerintah, Kewirausahaan ( <i>Entrepreneur</i> ) terhadap Produktivitas Usaha dan Keberlanjutan ( <i>Sustainability</i> ) Pekebun Kecil pada Industri Kelapa Sawit di	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Pemerintah disektor Perkebunan (<math>X_1</math>)</li> <li>2. Kewirausahaan (<math>Y_1</math>)</li> <li>3. Produktivitas Usaha (<math>Y_2</math>)</li> <li>4. Keberlanjutan (<math>Y_3</math>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Metode penelitian Eksplanasi (<i>Level of Explanation</i>)</li> <li>b) Pengujian hipotesis menggunakan skala Likert</li> <li>c) Analisis <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM)</li> </ul>	Kebijakan pemerintah terhadap tingkat kewirausahaan tidak memiliki pengaruh signifikan.

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
		Provinsi Riau (Studi pada Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau)			
5.	Soontornthum (2007)	<i>The Effects of Government Assistance on The Entrepreneurs' Intention to Internationalize : an Empirical Study of Thai Entrepreneurs in Food Business</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karakteristik Wirausaha (<math>X_1</math>)</li> <li>2. Karakteristik Perusahaan (<math>X_2</math>)</li> <li>3. Permasalahan dalam Mengoperasikan Bisnis Lintas Negara (<math>X_3</math>)</li> <li>4. Manfaat Dukungan Pemerintah (<math>X_4</math>)</li> <li>5. Minat Wirausaha untuk Melakukan Bisnis Internasional (<math>Y</math>)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif (campuran)</li> <li>b) Pengumpulan data : Kuesioner dan Wawancara</li> <li>c) Skala 5-Point Likert, Metode analisis 2-test, ANOVA, dan Multiple regresi</li> </ol>	<p>Bentuk dukungan pemerintah yang paling signifikan dalam meningkatkan kapabilitas dan kepercayaan diri wirausaha dalam proses memasuki pasar internasional adalah <i>workshop</i> dan seminar. Hal tersebut dirasa terlalu umum. Saran dari penelitian ini adalah jaringan yang diberikan oleh pemerintah adalah bantuan yang lebih efektif.</p>

Sumber : Diolah Peneliti, 2017

## C. Tinjauan Pustaka

### 1. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah adalah fasilitator dari berbagai permasalahan dalam sebuah negara, sebagai badan politik yang merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dengan tujuan yang telah disepakati bersama. Tujuan dari setiap pengambilan kebijakan oleh pemerintah adalah kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Penelitian ini memiliki variabel X yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memfasilitasi wirausaha.

Pembahasan penelitian ini lebih berfokus pada pengaruh program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai wujud kebijakan pemerintah terhadap tingkat kewirausahaan yang diketahui bahwa pelaksanaan kewirausahaan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai penelitian dan hubungan antar variabel, peneliti akan memberikan pemahaman dari kedua variabel secara umum.

#### a. Pengertian Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt dalam Soenarko (2003:41) pada buku yang berjudul *Public Policy* mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu keputusan yang bersifat matang berupa perilaku dan tindakan yang berulang, dilakukan oleh pembuat kebijakan itu sendiri maupun masyarakat yang harus mematuhi.

Thomas R. Dye pada buku Soenarko (2003:41) yang berjudul *Public Policy* juga memberikan penjelasan mengenai kebijakan pemerintah yaitu sebuah ketetapan yang dibuat oleh beberapa hal batasan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan pemerintah berdasarkan kenyataan yang ada pada masyarakat. Robert Eyestone pada buku Soenarko (2003:42) juga menambahkan pendapatnya mengenai kebijakan pemerintah adalah hubungan suatu lembaga pemerintah terhadap lingkungannya.

Carl J. Friedrich mengatakan kebijakan pemerintah adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatannya, yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta suatu tujuan tertentu. (Soenarko, 2003:42). “Dimock dalam bukunya yang berjudul *Public Administration* mengarahkan kebijaksanaan pemerintah atau kebijakan pemerintah adalah perpaduan dan kristalisasi pada pendapat-pendapat dan keinginan-keinginan banyak orang dan golongan-golongan dalam masyarakat” (Soenarko, 2003:43).

Menurut Soenarko (2003:43) kebijakan pemerintah adalah sebuah keputusan yang bertujuan untuk masa depan (*Goal-oriented*) atau bersifat futuristis. Memiliki pedoman utama yaitu kepentingan

masyarakat dalam kondisi atau situasi tertentu yang dapat dikatakan sebagai masalah dan kemudian dinamakan "*Public Issue*".

Berdasarkan berbagai penjelasan para ahli tentang kebijakan pemerintah, dapat disimpulkan kebijakan pemerintah adalah sebuah keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dalam membatasi dan mengatur hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta memiliki tujuan utama yaitu kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dengan orientasi masa depan. Kebijakan pemerintah bersifat wajib dilaksanakan oleh pembuat kebijakan dan objek-objek atau sasaran kebijakan tersebut. Dalam hal ini kebijakan pemerintah juga mempengaruhi masalah kewirausahaan, karena adanya kewirausahaan dapat mempengaruhi situasi perekonomian suatu negara di mana masalah atau situasi perekonomian merupakan salah satu tugas pemerintah.

#### **b. Kebijakan Pemerintah pada Kewirausahaan**

Sebuah kebijakan selalu identik dengan kata sistematis, begitu juga dengan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Pemerintah merupakan lembaga formal yang juga memiliki sistem kerja sistematis. Sebelum membahas tentang kebijakan pemerintah dalam hal kewirausahaan, bagian ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang arti dari kata sistematis atau sistem sebagai pola atau komponen dalam aliran informasi yang akan disalurkan oleh pemerintah kepada wirausaha. Kata sistem di sini bisa dipahami dari kutipan (Rosenberg

dan Nelson, 1994; 4-5) dalam Ács, Autio, Szerb (2013:477) “... *a set of institutions whose interactions determine the innovative performance of nations firms. There is no presumption that the system was on some sense, consciously designed, or even that the set of institutions evolved works together smoothing and coherently...*”.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami sistem dari kebijakan pemerintah dalam hal kewirausahaan berperan dalam membuat dan menyebarkan pengetahuan baru dan penggunaan sumberdaya secara efisien dengan tujuan adanya inovasi. Bentuk responsif pemerintah terhadap kewirausahaan adalah dengan membuat program-program yang berfungsi sebagai tempat wirausaha dapat dengan mudah mengakses informasi, pendidikan, modal, dan sumberdaya lain yang mungkin tidak terjangkau, tidak dapat diakses, dan belum diketahui. Penelitian ini akan membahas kebijakan pemerintah dalam hal memudahkan wirausaha untuk mengakses permodalan.

Murphy (2004) menambahkan bahwa kebijakan pemerintah dapat membantu wirausaha dalam mengakses aktivitas internasional. Menurut Reynolds (2003) bahwa dukungan pemerintah dapat disalurkan melalui pelatihan dan konsultasi yang dapat meningkatkan adanya peningkatan kewirausahaan dalam negara tersebut. Young dan Welch juga menyatakan bahwa pemerintah memiliki peran dalam peningkatan kewirausahaan dengan mendukung aspek keuangan untuk

membuat lingkungan eksternal dari wirausaha tersebut dapat lebih mendukung (dikutip dalam Kozan, 2006:118).

Secara umum, Jackson mengatakan bahwa kewirausahaan membutuhkan dukungan akurat dari pemerintah agar dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian negara. Pada awalnya dukungan pemerintah sering diabaikan oleh wirausaha, namun dengan berjalannya waktu dan segala usaha pemerintah dalam memperkenalkan program-program yang dimiliki, pemerintah dan wirausaha dapat mulai bekerja sama dengan saling menguntungkan (Ács, Autio, Szerb, 2013).

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan negara adalah upaya kewirausahaan yang memiliki dampak kepada keefektifan pemerintah dalam mengambil kebijakan dan dapat mengambil keuntungan dari adanya pembaharuan seperti dalam hal pengetahuan dan inovasi teknologi (Kenney, 2000; Lundvall *et al.*, 2002; Nelson, 1993 dalam Ács, Autio, Szerb, 2013:477).

Kewirausahaan memiliki peranan penting dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan sosial, masalah-masalah yang dapat diperbaiki dari adanya kewirausahaan yaitu; tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran terutama untuk masyarakat berpendidikan rendah, penyebaran pendapatan yang tidak merata, pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan, dan masalah urbanisasi (Agustina, 2015: 6). Burch (1986)

berpendapat mengenai dampak sosio-ekonomis dari adanya kewirausahaan dalam sebuah negara yaitu: (1) Menciptakan lapangan pekerjaan, (2) Meningkatkan kualitas hidup, (3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, (4) Adanya perataan pengelolaan sumber daya guna meningkatkan produktivitas nasional, (5) Meningkatkan kesejahteraan pemerintah melalui program pemerintah (Agustina, 2015: 6).

Beberapa pemerintah di negara maju telah memiliki fokus dalam upaya permodalan kewirausahaan, dengan asumsi semakin banyak modal usaha maka akan meningkatkan produktivitas kewirausahaan (Bygrave *and* Quill, 2007:5). Cumming (2007) mengatakan bahwa Negara Australia telah memiliki program permodalan dalam kewirausahaan semenjak tahun 1997 dengan nama “*Australian Innovation Investment Fund Governmental Program*” dengan mekanisme membiayai masyarakat yang ingin membuka usaha baru, *Start-up*, perusahaan berbasis teknologi, dengan mengawasi keefektifan penggunaan biaya selama usaha tersebut berjalan (Bygrave *and* Quill, 2007:4).

Kreft *and* Sobel (2005) mengatakan yang lebih spesifik bahwa hubungan kewirausahaan dengan modal usaha adalah berbanding terbalik. Aktivitas permodalan kewirausahaan akan menarik pembiayaan modal usaha lainnya dari berbagai pihak walaupun hal tersebut tidak benar adanya. Pada akhirnya, modal usaha hanya akan

mengeluarkan jumlah biaya yang kecil dari seluruh pembiayaan yang diajukan oleh wirausaha, dan pembiayaan hanya diberikan hanya sedikit golongan dengan potensi usaha tertinggi dalam di beberapa negara (Bygrave *and* Quill, 2007 dalam Minniti, 2008:782).

Indonesia memiliki program khusus dalam permodalan kewirausahaan, salah satu bukti fokus pemerintah Indonesia dalam kewirausahaan terlihat dari adanya kementerian khusus yang mengatur kewirausahaan yaitu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengatur segala aktifitas usaha-usaha kecil dan menengah diseluruh Indonesia, namun beberapa kementerian Indonesia memiliki program dalam mengembangkan wirausaha seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Indonesia memiliki beberapa program dalam meningkatkan kewirausahaan di Indonesia, dikutip dari berita Warta Ekonomi tanggal 5 September 2017 dengan judul “Kewirausahaan akan jadi Program Prioritas Pemerintah” yaitu pemerintah telah memiliki strategi pengembangan kewirausahaan dengan mengadakan pelatihan atau bimbingan teknis kewirausahaan, memfasilitasi permodalan berupa pinjaman dana, memfasilitasi promosi dan pameran produk yang berbasis teknologi dan fasilitas Hak Cipta dan Hak Merek ([www.wartaekonomi.co.id](http://www.wartaekonomi.co.id), 2017). Penelitian ini hanya membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam memfasilitasi permodalan berupa peminjaman dana.

Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pasal 7 dan 8 mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek diantaranya terkait pendanaan. Kebijakan pendanaan tersebut ditujukan untuk memperluas sumber pendanaan dan memperluas jaringannya, memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan, dan membantu UMKM mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya dengan jaminan pemerintah.

Perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan kebijakan pemerintah tentang kewirausahaan di Indonesia, bukan hanya di Indonesia tetapi beberapa pemerintah negara ASEAN juga memiliki konsentrasi khusus yang mengatur tentang kewirausahaan ditambah dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) akan meningkatkan konsentrasi pemerintah dalam membuat kebijakan dan meningkatkan minat masyarakat dalam berwirausaha.

### **c. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki permodalan tambahan atau modal tambahan yang belum cukup. Program Kredit Usaha Rakyat adalah program prioritas kebijakan pemerintah dalam hal pemberian

kredit/pembiayaan kepada wirausaha. Individu/perseorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif sebagai penerima program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan sumber dana 100% dari dana penyaluran program berdasarkan 9% suku bunga efektif per tahun atau sama dengan suku bunga flat yang setara.

Pencapaian *output*/kinerja yang telah dihasilkan merupakan hasil koordinasi dan sinergitas antara para pemangku kepentingan program yang tergabung dalam Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta dengan bank pelaksana, perusahaan penjamin, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah baik dalam skala Provinsi atau Kabupaten/Kota dibawah koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. *Output* yang dihasilkan membawa *outcome* yang positif khususnya dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan ([www.kur.ekon.go.id](http://www.kur.ekon.go.id), 2017).

Tujuan utama program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah meningkatkan dan memperluas pelayanan Bank kepada wirausaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing wirausaha, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Selama tahun 2007-2014 program Kredit Usaha Rakyat (KUR) disalurkan oleh 33 Bank dengan skema Imbal Jasa Penjaminan (IJP) menghasilkan penyerapan tenaga kerja sebesar 20,3 juta jiwa dengan penyaluran

Kredit Usaha Rakyat Mikro sebesar Rp 96,26 triliun (53,8%) dan Kredit Usaha Rakyat Ritel sebesar Rp 82,56 triliun (46,17%). Efisiensi anggaran pada PMN Askrindo Rp 5,2 triliun, PMN Jamkrindo Rp 6,5 triliun dengan total pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar Rp 5,02 triliun. Berdasarkan *workshop*/seminar evaluasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Rakor Komite kebijakan pada tanggal 15 Desember 2014, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tetap dilanjutkan dengan penguatan regulasi dan perbaikan skema.

Hasil evaluasi melalui kajian oleh pihak terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) seperti Bank Dunia dan TNP2K menjadi salah satu dasar dalam upaya perbaikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang antara lain adalah dengan meningkatkan penyalurannya kepada sektor prioritas seperti sektor pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan dan industri pengolahan serta kepada Usaha Mikro dan Kecil dengan tujuan sektor-sektor tersebut mempunyai *multiplier effect* yang lebih besar kepada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu wujud kebijakan pemerintah dalam upaya memfasilitasi kewirausahaan di Indonesia, program tersebut memiliki dampak langsung terhadap perekonomian Indonesia seperti lebih banyak menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Kinerja dan sasaran dalam program ini dikaji dengan baik oleh pemerintah terutama Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian dengan selalu melakukan evaluasi program dan pembaharuan regulasi.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki 2 (dua) skema yang berbeda hasil dari evaluasi yang dilakukan pemerintah seperti yang dijelaskan dibagian sebelumnya. Penelitian ini akan membahas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam skema Imbal Jasa Penjaminan (IJP) pada periode tahun 2008-2014 yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam skema tersebut.

## **2. Tingkat Kewirausahaan**

Kewirausahaan merupakan keinginan seseorang dalam mengimplikasikan sebuah ide kreatif dengan cara mempekerjakan diri sendiri, tidak memiliki pemimpin tetapi menjadikan diri sendiri sebagai pemimpin untuk diri sendiri dan orang lain. Menurut Fuadi (2009:92), “Berwirausaha adalah keinginan, keterkaitan, serta kesediaan untuk bekerja keras atau berkemauan keras untuk berusaha secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merasa takut dengan resiko yang akan terjadi, serta berkemauan keras untuk belajar dari kegagalan.”

Sebelum memahami lebih dalam tentang tingkat kewirausahaan, penelitian ini akan menjelaskan tentang pemahaman konsep kewirausahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berwirausahaan.

### a. Pengertian Kewirausahaan

Chrisma (2009) dalam Hendro (2011:29) mengartikan wiraswasta merupakan istilah yang lebih awal dikenal sebelum masyarakat mengenal wirausaha. Wiraswasta merupakan gabungan kata dari wira, swa, dan sta yang berarti wira adalah utama, gagah, berani luhur, dan teladan, swa merupakan arti dari sendiri, sedangkan sta merupakan kata dari berdiri. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan arti kata dari wirausaha (*entrepreneur*) adalah pejuang yang utama, luhur, gagah, berani, dan menjadi teladan dalam usaha mandiri dengan pedoman diri sendiri. Namun saat ini, masyarakat lebih mengenal dengan istilah wirausaha yang berarti paduan dari rasa semangat, nilai-nilai yang dipercaya, prinsip diri sendiri, seni dan tindakan nyata yang memiliki tindakan nyata dalam membangun dan mengembangkan usaha serta memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, pihak eksternal maupun pihak internal.

Kewirausahaan merupakan petualang, berani mengambil risiko, kontraktor, dan pencipta yang menjual hasil dari ciptaannya. Kewirausahaan merupakan bahasa Indonesia yang memiliki sebutan lain dinegara-negara lain yaitu *entrepreneur* dalam bahasa Inggris dan Perancis, *unternehmer* dalam bahasa Jerman, dan *ondernemen* dalam bahasa Belanda (Hendro, 2011:29).

Sedangkan Ilyas dan Gumilar (2012:1200) melihat kewirausahaan sebagai sebuah tindakan nilai finansial dan nilai sosial tertentu (modul kewirausahaan) dari proses pemikiran kreatif dan inovasi yang berasal dari seseorang sebagai pelaku kewirausahaan yang disebut wirausaha (*entrepreneur*).

Zimmerer, Scarborough, Wilson (2008:4) menyimpulkan bahwa wirausaha (*entrepreneur*) adalah seseorang yang merealisasikan ide nya berupa bisnis baru dan berani mengambil risiko berupa ketidak pastian dalam keuntungan dan pertumbuhan. Seseorang berani mengambil risiko karena dapat mengidentifikasi peluang dan memaksimalkan sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki. Zimmerer, Scarborough, Wilson (2008:7-9) juga menjelaskan tentang profil kewirausahaan, yaitu :

1. Memiliki Rasa Bertanggung Jawab

Wirausaha memiliki rasa bertanggung jawab yang lebih besar di banding menjadi seorang karyawan atas pekerjaan yang dimiliki karena tanggung jawab pekerjaan dibebani oleh dan untuk diri sendiri.

2. Berani Mengambil Risiko

Wirausaha berani mengambil risiko bukan berarti benar-benar melawan risiko tersebut, tetapi lebih kepada upaya kreatif untuk menghapus risiko dan halangan-halangan keberhasilan di masa mendatang. Salah satu upaya wirausaha yaitu membuat

strategi dan perencanaan bisnis yang kokoh sebelum memulai usahanya.

### 3. Memiliki Keyakinan untuk Sukses

Sebelum mengimplementasikan bisnisnya, wirausaha sudah memiliki perencanaan dan strategi bisnis yang matang. Berdasarkan perencanaan yang matang, wirausaha telah menduga adanya risiko dan berupaya menyelesaikan risiko tersebut. Halangan-halangan yang akan terjadi dimasa mendatang sudah diperkirakan, sehingga hanya tertinggal rasa yakin untuk kesuksesan usahanya.

### 4. Berupaya untuk Mendapatkan Umpan Balik

Selama memulai usaha yang sudah direncanakan, wirausaha pasti menemukan banyak tantangan. Oleh karena itu, sifat untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan usahanya sangat diperlukan dalam waktu dekat setelah wirausaha menyelesaikan tantangan-tantangan.

### 5. Memiliki Semangat yang Tinggi

Wirausaha lebih dominan memiliki semangat yang lebih tinggi dibandingkan karyawan karena orientasi yang dimiliki adalah diri sendiri.

## 6. Fokus pada Masa Depan

Wirausaha lebih mementingkan kesuksesan di masa depan. Saat ini dan masa lalu dijadikan sebagai sebuah pelajaran dan proses dalam kesuksesan dimasa mendatang.

## 7. Kemampuan Berorganisasi

Membangun usaha dari awal, bukan hanya berfokus pada operasional usaha produk atau jasa yang diberikan. Kesuksesan sebuah usaha juga didasarkan pada sumberdaya-sumberdaya yang dapat dimaksimalkan. Seorang wirausaha pasti memiliki keterampilan berorganisasi agar selalu dapat meningkatkan kualitas sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki.

## 8. Melihat Prestasi Menjadi Hal Terpenting

Wirausaha lebih mementingkan prestasi dan kualitas kinerja dibandingkan hal lain. Prestasi dan meningkatkan kualitas kinerja merupakan motivasi utama, wirausaha sangat mementingkan sebuah proses keberhasilan.

Zimmerer, Scarborough, Wilson (2008:9-10) menjelaskan karakteristik lain yang ada pada wirausaha, yaitu : Memiliki komitmen tinggi, memahami bahwa kewirausahaan memiliki sifat ketidak pastian, fleksibel, dan ulet.

### **b. Manfaat Kewirausahaan**

Zimmerer, Scarborough, Wilson (2008:11-14) menjelaskan manfaat menjadi wirausaha, yaitu :

1. Peluang untuk Menentukan Nasib Sendiri

Memiliki usaha sendiri menjadikan seseorang bisa menentukan nasib masa depan yang terbaik untuk di jalani.

2. Peluang untuk Melakukan Perubahan

Kewirausahaan merupakan salah satu penggerak perekonomian suatu negara. Menjadi wirausaha berarti menjadi salah satu penggerak atau pelaku perubahan perekonomian negara.

3. Peluang untuk Mencapai Potensi Sepenuhnya

Kewirausahaan merupakan salah satu media pengaktualisasian diri bagi para pelakunya. Kewirausahaan merupakan gambaran nyata dari potensi seseorang yang memilikinya. Potensi yang dimiliki dapat terus-menerus berkembang.

4. Peluang untuk Meraih Keuntungan yang Lebih Besar

Sebuah kewirausahaan memang tidak memiliki profit yang pasti dalam satu periode dibandingkan keuntungan yang didapatkan oleh karyawan dalam aspek finansial. Maka dari itu, kewirausahaan lebih mementingkan sebuah proses dan kualitas kinerja. Apabila sebuah wirausaha sudah memiliki kualitas yang baik, maka keuntungan yang berupa finansial secara otomatis akan meningkat.



#### 5. Peluang untuk Berperan dalam Masyarakat dan Lingkungan

Saat ini pemerintah sedang menggalangkan program-program mendukung peningkatan kewirausahaan, karena kewirausahaan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Seperti yang telah dijelaskan oleh Agustina (2015:6) pada bagian sebelumnya, adanya kewirausahaan dapat menyelesaikan beberapa permasalahan perekonomian negara seperti; pengangguran, pembangunan infrastruktur, dan pendapatan per kapita.

#### 6. Peluang untuk Menjadikan Pekerjaan sebagai Hal yang disukai

Menjadi wirausaha merupakan salah satu upaya seseorang untuk mengimplementasikan hal-hal yang disukai. Bekerja sesuai dengan hasrat diri.

#### c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Seseorang Berwirausaha

Bygrave (1994:3) dalam Alma (2016:9) menjelaskan 3 (tiga) faktor yang berpengaruh terhadap seseorang untuk berwirausaha, yaitu :

##### 1. Personal

Faktor personal ini bersangkutan dengan aspek-aspek kepribadian seseorang. David McCeland dalam Alma (2016:13) pada buku *The Achieving Society* menyatakan bahwa wirausaha adalah seseorang yang memiliki rasa untuk lebih berprestasi dibandingkan orang lainnya atau seorang

karyawan. Dengan kata lain, personal merupakan faktor internal dalam mempengaruhi seseorang untuk memiliki minat kewirausahaan. Alma (2016:13) berdasarkan penelitian di Inggris bahwa motivasi seseorang untuk menjadi wirausaha adalah 50% yaitu kebebasan pilihan diri sendiri, 18% berorientasi keuangan, dan 10% beralasan hobi, kesenangan, dan kepuasan diri untuk melakukan hal-hal yang memerlukan kreatifitas dan inovasi.

## 2. *Sociological*

Faktor ini berhubungan dengan keluarga dan aspek sosial lainnya. Faktor yang mempengaruhi minat kewirausahaan ini bisa berupa dari orang tua, pekerjaan, dan status sosial (Alma, 2016:9). Faktor sosial yang dimaksud adalah tanggung jawab diri kepada keluarga. Faktor pekerjaan orang tua juga mempengaruhi minat anak dalam meneruskan pekerjaannya, seseorang yang memiliki orang tua yang menjadi wirausaha cenderung akan mengikuti atau meneruskan usaha yang telah dibangun oleh orang tuanya (Alma 2016:8). *Sociological* adalah faktor eksternal dalam mempengaruhi minat kewirausahaan seseorang. Faktor sosial lainnya yang disebut sebagai “*Role Model*” yaitu seseorang yang melihat wirausaha yang terlebih dahulu sukses dan dijadikan sebagai inspirasi, bisa dari keluarga,

teman, pasangan, atau pengusaha sukses lainnya (Alma, 2016:7). Hal ini berpengaruh terhadap semangat berwirausaha karena dengan kedekatan tersebut, seseorang yang telah memiliki sedikit rasa ingin tahu tentang wirausaha dapat berdiskusi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman.

### 3. Lingkungan

Suryana (2008:63) menyatakan yang termasuk dalam faktor lingkungan adalah model peran, peluang, aktivitas, pesaing, sumber daya, dan kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, faktor lingkungan merupakan faktor eksternal dalam mempengaruhi seseorang untuk berwirausaha. Seperti yang telah dicontohkan Alma (2016:13) adanya daerah yang bernama Silicon Valley di Amerika Serikat dengan dominasi pekerjaan penduduknya yaitu wirausaha. Hal ini bisa terjadi karena dorongan lingkungan yang mendukung, seperti transportasi, pergudangan, perbankan, dan berbagai jasa konsultan yang memadai.

Selain itu, Tjahjono dan Ardi (2008:46) mengungkapkan keputusan seseorang untuk berwirausaha merupakan perilaku dengan keterlibatan (*high involvement*) yang dibagi menjadi 2 (dua) faktor yaitu :

- Faktor internal berupa persepsi, motivasi, pembelajaran, dan kepribadian.
- Faktor eksternal berupa keluarga, teman, lingkungan sekitar, pemerintah.

McLelland (1961:207) menjelaskan tentang kewirausahaan dalam Suryana (2008:62) bahwa “kewirausahaan ditentukan oleh motif berprestasi, optimisme, sikap, nilai, dan status kewirausahaan atau keberhasilan”. Menurut Soedjono dalam Suryana (2008:62) bahwa kemampuan afektif merupakan sikap, nilai, aspirasi, perasaan, dan emosi yang tergantung pada kondisi lingkungan maka kemampuan afektif dan kognitif merupakan bagian dari pendekatan kemampuan berwirausaha.

#### **D. Hubungan Antar Konsep**

Penelitian ini menggunakan variabel program Kredit Usaha Rakyat (KUR) (X) sebagai variabel independen dan variabel tingkat kewirausahaan (Y) sebagai variabel dependen. Teori Schumpeter dalam Sukirno (2012:434) menjelaskan tentang pentingnya peran kewirausahaan dalam pertumbuhan ekonomi. Teori Schumpeter mengatakan bahwa wirausaha merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi suatu negara. Teori Schumpeter dalam Sukirno (2012:435), Wirausaha disebutkan sebagai golongan yang terus-menerus membuat pembaharuan dan inovasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembaharuan dan inovasi tersebut meliputi; memperkenalkan

barang-barang baru, menyelesaikan permasalahan kebutuhan masyarakat, meningkatkan efisiensi produktivitas dalam menghasilkan barang dan jasa, memaksimalkan sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki (Agustina, 2012:6).

Berdasarkan teori Schumpeter, dapat dipahami bahwa kewirausahaan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian sebuah negara. Pemerintah sebagai pihak utama dalam memfasilitasi masyarakat memiliki hak dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Intervensi pemerintah dalam pengelolaan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan mengambil kebijakan yang memiliki keuntungan untuk berbagai pihak.

Saat ini dengan persaingan yang kuat di negara-negara berkembang, menarik perhatian pemerintah untuk melakukan permodalan kewirausahaan sehingga wirausaha dalam negeri dapat internasionalisasi dan bersaing dengan negara-negara lain, dengan membuat visi bisnis internasional (Djankov, La porta, Lopez-de-Silanes, and Shleifer, 2002:22). Adanya persaingan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, yang merupakan tujuan utama sebuah pemerintahan dibuat. Kebijakan pemerintah merupakan salah satu faktor eksternal dalam meningkatkan kewirausahaan. Sesuai dengan hasil penelitian Putra (2012) bahwa kebijakan pemerintah merupakan salah satu faktor eksternal atau yang di sebutkan dalam penelitian tersebut adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi seseorang menjadi wirausaha.

Kebijakan pemerintah memiliki keuntungan untuk berbagai pihak khususnya mempermudah proses masyarakat dalam membangun

kewirausahaan. Kebijakan tentang kewirausahaan dikeluarkan oleh pemerintah diantaranya dalam hal keuangan/permodalan, pajak, regulasi perdagangan, dan meningkatkan aktivitas berinovasi (Minniti, 2008:782). Pernyataan Minniti berhubungan dengan Schumpeter mengenai inovasi, bahwa pemerintah berhubungan langsung dengan kewirausahaan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi kewirausahaan yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara.

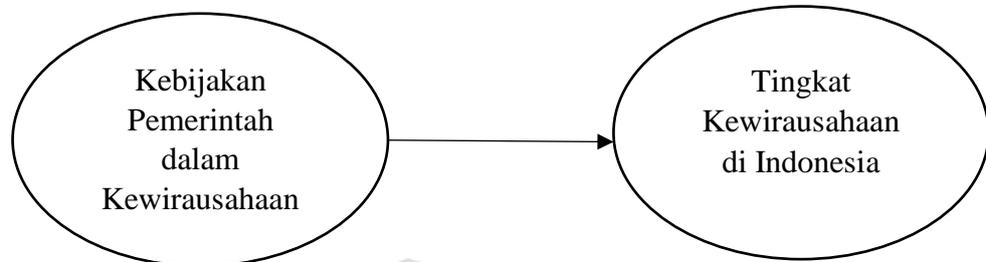
Seperti hasil penelitian Obaji *and* Olugu (2014) adalah beberapa negara menempatkan kewirausahaan sebagai dasar dari adanya industrialisasi ekonomi. Penelitian ini hanya membahas upaya kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal keuangan/permodalan kewirausahaan di Indonesia yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR). sesuai dengan yang hasil penelitian Ács, Autio, Szerb (2013) bahwa untuk meningkatkan tingkat kewirausahaan dalam suatu negara memerlukan biaya tertentu.

## **E. Model Konseptual dan Model Hipotesis**

### **1. Model Konseptual**

Berdasarkan penjelasan bagian sebelumnya, kebijakan pemerintah memiliki dampak pada tingkat kewirausahaan di Indonesia, oleh karena itu wirausaha dapat saling bersinergi dengan pemerintah dalam meningkatkan kewirausahaan dalam negeri. Peneliti akan membahas variabel pengaruh kebijakan pemerintah dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tujuan meningkatkan tingkat kewirausahaan di Negara Indonesia. Oleh

karena itu, Model konseptual dalam penelitian ini akan digambarkan pada Gambar 2.1 sebagai berikut.



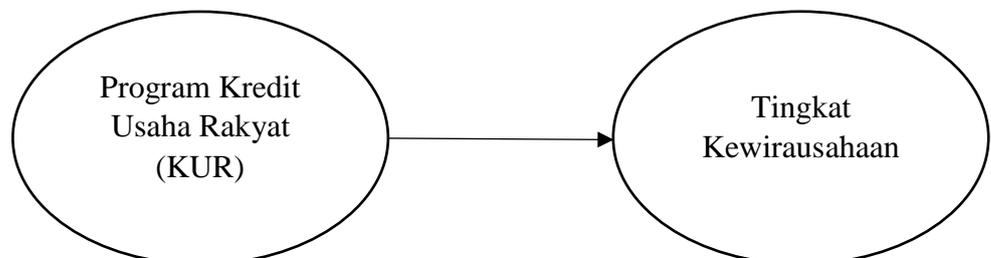
**Gambar 2.1 Model Konseptual**

Sumber : Diolah peneliti, 2017

## 2. Model Hipotesis

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya” (Sugiyono, 2009:93). Merumuskan hipotesis bertujuan untuk mendapatkan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Penelitian ini memiliki hipotesis yang akan digambarkan pada Gambar 2.2, yaitu :

$H_1$  : Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai wujud kebijakan pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kewirausahaan di Indonesia.



**Gambar 2.2 Model Hipotesis**

Sumber : Diolah Peneliti, 2017

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2003:3) setiap penelitian memiliki tujuan dan kegunaan yang berbeda-beda, oleh sebab itu Sugiyono membagi tujuan penelitian menjadi 3 (tiga) macam yaitu: Penemuan, Pembuktian, dan Pengembangan. Penelitian ini bersifat Pembuktian, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2003:3) pembuktian merupakan penelitian yang mencari data-data yang digunakan untuk menemukan pembuktian dari adanya dugaan atau hipotesis terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Penelitian ini menguji apakah program Kredit Usaha Rakyat (KUR) (X) sebagai upaya kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kewirausahaan di Indonesia berpengaruh terhadap Tingkat Kewirausahaan (Y) di Indonesia pada periode tahun 2008 sampai dengan 2014.

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori (*Explanatory Research*). Penelitian eksplanatori yaitu penelitian yang bermaksud untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antar satu variabel dengan variabel lain (Sugiyono, 2003:11). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu menguji pengaruh variabel terikat dengan variabel bebas untuk mengetahui gambaran hubungan antar variabel, hasil dari

pendekatan kuantitatif bisa berupa angka yang terukur secara pasti dan penjelasan.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian dan pengambilan data. Penelitian ini dilakukan di Indonesia melalui *website* resmi pemerintahan Indonesia maupun lembaga internasional lainnya. Sumber penelitian ini didapatkan dari instansi terkait secara langsung maupun *website* resmi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (<http://kur.ekon.go.id/>) dan *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS) (<http://bps.go.id/>). Alasan menggunakan *website-website* tersebut sebagai sumber penelitian bahwa *website* tersebut menyediakan data-data yang lengkap dan relevan terhadap penelitian ini, serta sebagian data tersebut berasal dari hasil survey atau sensus. Selain itu data-data yang didapatkan dari *website* tersebut sudah memiliki keabsahan atau *valid*.

Penelitian ini meneliti Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu wujud kebijakan pemerintah di Indonesia dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kredit Usaha Rakyat merupakan program yang bertujuan untuk mendukung pembiayaan/kredit kepada wirausaha sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses wirausaha seluruh sektor produksi dengan pembiayaan perbankan dan mendorong perekonomian. Sistemika penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dibagi berdasarkan bidang

usaha yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) ritel dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro.

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan penyedia kebutuhan data untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Data-data tersebut didapatkan dengan sensus atau survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik sendiri atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder. Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan sumber data dari variabel dependen pada penelitian ini yaitu tingkat kewirausahaan. Jumlah penduduk yang berprofesi wirausaha dari tahun ketahun dikatakan sebagai tingkat kewirausahaan yang dilihat dalam kategori “Berusaha Sendiri” pada status pekerjaan utama masyarakat Indonesia.

### C. Variabel Penelitian

Sugiyono (2003:38) mengatakan “variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”. Dapat dipahami bahwa variabel penelitian adalah objek utama yang akan diteliti, dipelajari, dan dijabarkan sehingga mendapatkan kesimpulan berdasarkan pada pengolahan data. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen.

#### a. Variabel Independen (X)

Sugiyono (2003:39) mengatakan bahwa variabel ini disebut sebagai variabel *stimulus*, *prediktor*, *antecedent*. Variabel ini adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab dari adanya sebuah perubahan terhadap variabel dependen. Variabel independen biasa dikatakan sebagai variabel

bebas. Variabel independen pada penelitian ini adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR) menggunakan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

**b. Variabel Dependen (Y)**

Sugiyono (2003:40) mengatakan bahwa variabel dependen disebut sebagai variabel hasil, kriteria, dan konsekuensi. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat berdasarkan dari variabel independen. Variabel dependen biasa dikatakan sebagai variabel terikat. Variabel dependen pada penelitian ini adalah tingkat kewirausahaan di Indonesia menggunakan kategori “Berusaha Sendiri” dalam status pekerjaan utama.

**D. Operasionalisasi Variabel**

Definisi operasional adalah penjabaran mengenai pengertian dari konsep setiap variabel (Murti dan Wahyuni, 2006:26). Bagian operasionalisasi variabel merupakan penjelasan bentuk data dari setiap variabel yang akan diteliti. Setiap variabel yang diteliti harus memiliki pemahaman konsep yang jelas agar memudahkan peneliti dan pembaca, serta memudahkan peneliti dalam mengolahan data.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder dalam bentuk dokumen atau *file*. Penelitian ini menggunakan data *time series* dalam jangka waktu 7 tahun. Berikut operasionalisasi dari setiap variabel dalam penelitian ini :

### 1. Variabel Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) (X)

Variabel program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai variabel independen pada penelitian ini merupakan salah satu upaya kebijakan pemerintah Indonesia dengan tujuan memfasilitasi masyarakat Indonesia untuk menjadi seorang wirausaha. Data dari variabel ini merupakan penyaluran dana program Kredit Usaha Rakyat (KUR) setiap tahunnya atau *time series* dalam periode tahun 2008 sampai 2014 dengan skema Imbal Jasa Penjaminan (IJP).

Sistematika penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah dengan memberikan pendanaan berupa penjaminan pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat yang berniat untuk menjadi wirausaha dan mengajukan pinjaman model kepada Bank-Bank yang telah ditentukan di seluruh provinsi di Indonesia. Data variabel program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersumber pada *website* resmi program Kredit Usaha Rakyat yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Perekonomian Indonesia. Data variabel Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbentuk nominal rupiah dengan data penelitian skala interval.

### 2. Variabel Tingkat Kewirausahaan (Y)

Tingkat kewirausahaan merupakan data yang berupa *time series* dari periode tahun 2008 sampai 2014 dengan data penelitian skala interval berasal dari kategori “Berusaha Sendiri” dari status pekerjaan utama masyarakat Indonesia. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat jumlah masyarakat Indonesia yang menjadi wirausaha setiap tahunnya.

Sumber data variabel ini menggunakan data dokumentasi hasil sensus yang dilakukan oleh Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) dan diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang diterbitkan di *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Bertujuan mempermudah pemahaman terhadap variabel dalam penelitian ini, berikut Tabel 3.1 operasionalisasi variabel :

**Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel**

No.	Variabel	Sumber	Definisi Operasional Variabel	Skala Data
1.	Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) (X)	Kementerian Koordinator Perekonomian ( <a href="http://www.kur.ekon.go.id">www.kur.ekon.go.id</a> )	Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai kebijakan pemerintah dalam memfasilitasi wirausaha di Indonesia yang disalurkan melalui skema Imbal Jasa Penjaminan yaitu selama periode tahun 2008-2014 atau <i>time series</i> .	Interval
2.	Tingkat Kewirausahaan (Y)	Badan Pusat Statistik ( <a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a> )	Tingkat kewirausahaan menunjukkan jumlah masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai wirausaha dalam periode tahun 2008-2014. Masyarakat Indonesia yang berprofesi wirausaha menggunakan kategori “Berusaha Sendiri” dalam status pekerjaan utama masyarakat Indonesia.	Interval

Sumber: Diolah Peneliti, 2017

### E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung didapatkan oleh peneliti tetapi didapatkan dari sumber lain hasil dari pengolahan data dan dibuat dalam sebuah dokumen (Dokumentasi) (Sugiyono, 2003:156). Pengumpulan data dalam variabel independen dalam penelitian ini menggunakan *website* resmi Kredit Usaha Rakyat (KUR) (<http://kur.ekon.go.id/>) dan melakukan observasi langsung sebagai pengumpulan data di Kementerian Koordinator Perekonomian sebagai pengelola dan pemilik kebijakan tersebut. Sedangkan pengumpulan data untuk variabel dependen bersumber pada *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS) (<http://bps.go.id/>).

Menurut Sugiyono (2008:224) pengumpulan data merupakan tahap paling strategis karena tujuan utama sebuah penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi. Menurut Juliandi dkk (2014:70) bahwa metode dokumentasi adalah metode dengan mengelola rekaman-rekaman data yang berupa dokumen tertulis maupun elektronik atau visual. Penelitian ini menggunakan data dokumentasi yang berasal dari Kementerian Koordinator Perekonomian Indonesia dan Badan Pusat Statistik.

### F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan analisis data dengan menggunakan angka atau perhitungan-perhitungan berdasarkan

rumus statistik. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan jawaban sehingga mendapatkan kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Analisis Statistik Deskriptif**

Menurut Sugiyono (2009:206) analisis deskriptif merupakan analisis data statistik dengan cara menggambarkan dan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan tanpa bermaksud menarik kesimpulan untuk umum dari data tersebut. Analisis deskriptif pada penelitian ini lebih kepada penjelasan dan menceritakan data-data yang telah dikumpulkan agar mendapatkan pemahaman lebih. Metode analisis ini bisa disajikan berdasarkan diagram, grafik, ataupun tabel. Penelitian ini menggunakan grafik dan tabel serta penjelasan sebagai penyajian data dalam analisis statistik deskriptif.

### **2. Analisis Inferensial**

Analisis inferensial adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diterapkan untuk populasi (Sugiyono, 2009:207). Dalam jenis analisis ini terdapat uji signifikansi yang bertujuan untuk menentukan taraf signifikan atas kesimpulan. Analisis inferensial terdiri dari :

### a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan fungsi atau model regresi yang digunakan sesuai dengan asumsi dasar dalam analisis regresi sederhana. Uji asumsi klasik dibagi menjadi :

#### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan teknik yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian distribusi normal pada variabel-variabel yang digunakan. Ada beberapa teknik pengujian normalitas, penelitian ini melakukan uji normalitas menggunakan uji *kolmogorov-smirnov*, yaitu hasil nilai signifikansi  $> \alpha = 0,05$  maka data tersebut dikatakan normal.

#### 2) Uji Autokorelasi

Santoso (2012:241) menyatakan tujuan adanya uji autokorelasi yaitu untuk mengetahui adanya kolerasi antara kesalahan penggunaan periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (periode sebelumnya) pada suatu model regresi linier. Jika data memiliki korelasi, maka dinamakan adanya masalah autokorelasi. Masalah autokorelasi biasanya terjadi pada penggunaan data periode waktu (*time series*). Model regresi yang mengalami gejala autokorelasi karena terdapat *standart error* yang sangat besar sehingga model regresi yang digunakan tidak signifikan (Ghozali, 2007:127).

Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW-test) dalam menguji gejala autokorelasi. Uji Durbin-Watson (DW-test) memiliki prosedur sebagai berikut :

$H_0 : \rho = 0$  (tidak terdapat autokorelasi di antara sisaan)

$H_1 : \rho \neq 0$  (terdapat autokorelasi di antara sisaan)

Statistik Durbin-Watson yang dirumuskan oleh statistik  $d$ , yaitu:

$$d = \frac{\sum (e_t - e_{t-1})^2}{\sum e^2}$$

$d$  adalah  $n-1$  dengan menggunakan Metode Kuadrat Terkecil (MKT) dengan menghitung koefisien regresi dan menentukan  $e_i$ , pengambilan keputusan berupa :

- a. Jika  $d < d_L$  atau  $d > (4 - d_L)$ , maka  $H_0$  ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
  - b. Jika  $d_U < d < (4 - d_U)$ , maka  $H_0$  diterima, yang berarti tidak terdapat autokorelasi
  - c. Jika  $d_L < d < d_U$  atau  $(4 - d_U) < d < (4 - d_L)$ , maka uji Durbin-Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (*inconclusive*) yang disimpulkan bahwa ada atau tidaknya autokorelasi terdapat pada faktor-faktor gangguan.
- 3) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas adalah pengujian apakah ada ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan terhadap

pengamatan lain dalam model regresi yang digunakan. Apabila ada perbedaan *variance* dari satu pengamatan terhadap pengamatan lain maka dikatakan adanya gejala Heterokedastisitas. Cara untuk mengetahui adanya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot yaitu ketika sumbu X dan Y memiliki pola tertentu atau tidak. Apabila memiliki pola tertentu berarti terjadi heterokedastisitas. Apabila tidak memiliki pola tertentu seperti adanya titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 dan sumbu Y maka dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas. Penelitian ini menggunakan uji heterokedastisitas *Scatterplot* dan uji *glejser* yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

#### **b. Regresi Linier Sederhana**

Penelitian ini menggunakan Paradigma Sederhana yaitu terdiri dari 1 (satu) variabel independen dan 1 (satu) variabel dependen (Sugiyono, 2009:8). Regresi linier sederhana merupakan teknik mengolah data yang bertujuan untuk membuat keputusan apakah naik turunnya variabel independen mempengaruhi naik turunnya variabel dependen (Sugiyono, 2009:260). Rumusan persamaan regresi linier sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b (X)$$

a = konstanta

b = koefisien regresi

Y = Variabel dependen (Tingkat Kewirausahaan)

X = Variabel Independen (program Kredit Usaha Rakyat)

### c. Uji Hipotesis

#### 1) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi merupakan pengujian yang berguna untuk memberikan informasi mengenai baik tidaknya model regresi yang ada dalam hipotesis. Nilai dari koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar variasi variabel Y atau variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel X atau variabel bebas. Semakin besar nilai hasil koefisien determinasi, berarti variasi variabel X atau variabel bebas memiliki variasi (pengaruh) besar terhadap variasi variabel Y atau variabel terikat.

Pengambilan keputusan terjadi apabila :

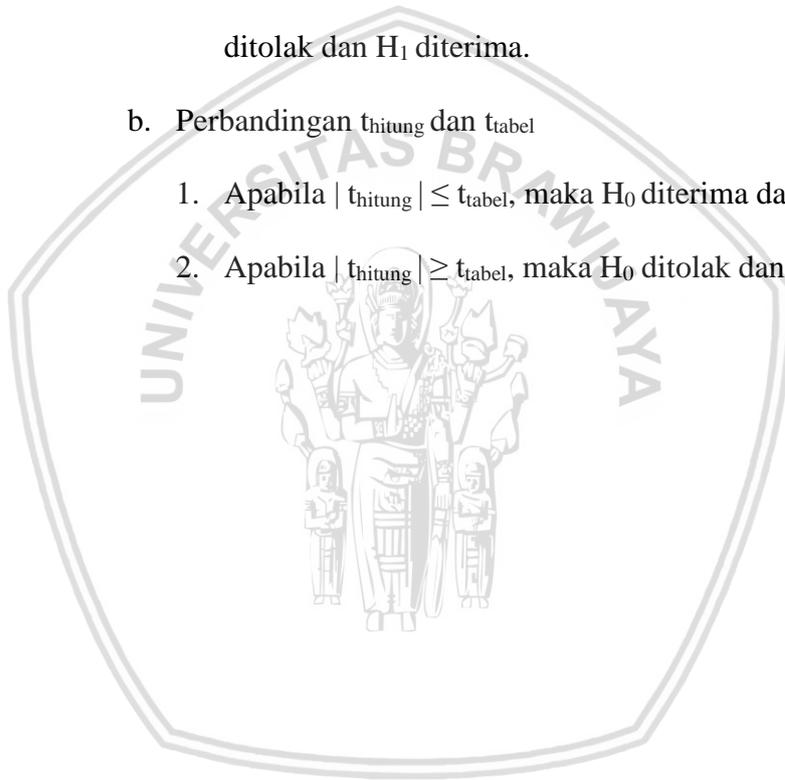
- a) Jika nilai  $R^2$  mendekati angka nol. Artinya, kemampuan variabel-variabel dependen dalam menjelaskan variabel independen sangat terbatas.
- b) Jika nilai  $R^2$  mendekati angka satu. Artinya, kemampuan variabel-variabel dependen dalam menjelaskan variabel independen sangat penting (Algifari, 2009:114).

#### 2) Uji Parsial (Uji t)

“Uji t dimaksudkan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas secara individual (parsial) terhadap variabel terikat, dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan” (Gujarati, 2001:116). Variabel bebas dapat dikatakan berpengaruh terhadap variabel terikat apabila probabilitasnya lebih kecil dari 0,05.

Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Perbandingan nilai signifikan dan taraf nyata
  1. Apabila nilai signifikansi  $\geq$  dari taraf nyata, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.
  2. Apabila nilai signifikansi  $\leq$  dari taraf nyata, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
- b. Perbandingan  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$ 
  1. Apabila  $|t_{hitung}| \leq t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.
  2. Apabila  $|t_{hitung}| \geq t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Kewirausahaan di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang beranggotakan Indonesia, Singapura, Cambodia, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. ASEAN memiliki pertumbuhan ekonomi yang potensial dengan total tenaga kerja lebih dari 400 juta jiwa dan total GDP 3,600 milyar US\$ memiliki sumber utama pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam. Pasar ASEAN adalah pasar yang tergolong potensial dengan 626 juta jiwa sebagai konsumen potensial, memiliki rata-rata PDB per-kapita 12.425,5 US\$ (*ASEAN Regional Entrepreneurship Report*, 2016).

Berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang dimiliki setiap Negara di ASEAN, berhubungan dengan adanya perkembangan kewirausahaan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi negara. Terkait dengan perkembangan kewirausahaan di negara-negara anggota ASEAN, studi *The Global Entrepreneurship Monitor* atau selanjutnya disebut GEM (2015) menghasilkan kondisi kewirausahaan di beberapa Negara ASEAN termasuk Indonesia.

### a. Tingkat Kewirausahaan di ASEAN

Kewirausahaan disuatu negara dapat dilihat berdasarkan beberapa hal yaitu potensi berwirausaha, minat berwirausaha, kewirausahaan yang baru didirikan, dan kepemilikan wirausaha yang sedang berkembang. Tingkat kewirausahaan di ASEAN dapat digunakan sebagai tolak ukur pertumbuhan kewirausahaan di Indonesia sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi negara di banding negara-negara yang bergabung dengan ASEAN. Berikut Tabel 4.1 menunjukkan tingkat kewirausahaan di beberapa negara ASEAN.

**Tabel 4.1 Tingkat Kewirausahaan di Beberapa Negara ASEAN (%)**

Negara	Potensi Kewirausahaan	Minat Berwirausaha	Kewirausahaan Baru	Kepemilikan Wirausaha yang Sedang Berkembang
Indonesia	44,4	27,5	17,7	17,2
Malaysia	14,8	5,6	2,93	4,8
Filipina	44,2	37,1	17,16	7,3
Thailand	25,1	16,7	13,7	24,6
Vietnam	29,7	22,3	13,7	19,6
<b>Rata-Rata</b>	<b>31,6</b>	<b>21,8</b>	<b>12,0</b>	<b>14,7</b>

Sumber : *The Global Entrepreneurship Monitor (GEM)*, 2015

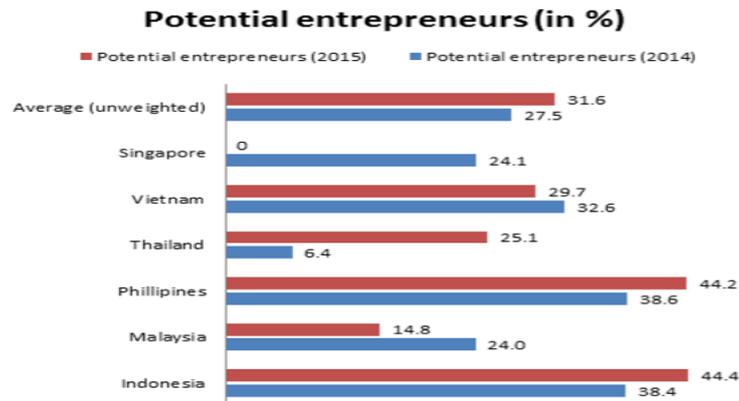
Berdasarkan Tabel 4.1, potensi berwirausaha dihitung pada persentase masyarakat usia 18 – 64 tahun atau pada usia produktif yang memiliki peluang dan kemampuan untuk menjadi wirausaha. Dilihat pada Tabel 4.1, potensi terbesar dalam suatu negara untuk meningkatkan kewirausahaan dalam negeri adalah Indonesia. Indonesia memiliki 44,4% masyarakatnya untuk menjadi wirausaha, yang diartikan bahwa Indonesia memiliki peluang meningkatkan kewirausahaan dalam negeri

apabila 44,4% masyarakat Indonesia mendapatkan fasilitas dan peluang untuk mengimplementasikan niat menjadi wirausaha. Sedangkan persentase terendah potensi wirausahaan yaitu pada Negara Malaysia.

Tingkat potensi berwirausaha di Indonesia memiliki peluang untuk meningkat karena adanya minat kewirausahaan sebesar 27,5%. Minat berwirausaha dapat berubah menjadi potensi wirausaha sampai mengimplementasikan usahanya apabila golongan tersebut telah melihat peluang dalam negeri. Walaupun persentase minat berwirausaha tertinggi adalah Negara Filipina, Indonesia masih unggul dalam tingkat kewirausahaan apabila dilihat pada wirausaha baru dan wirausaha yang sedang berkembang.

### **1. Potensi Kewirausahaan**

Potensi kewirausahaan ini diukur melalui survey yang dilakukan oleh GEM. Pada tahap ini, potensi menjadi wirausaha diklasifikasikan untuk seseorang yang belum memutuskan menjadi wirausaha, namun memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman potensial menjadi wirausaha. Hasil dari survey menyatakan bahwa wirausaha merupakan keadaan yang kompleks, seseorang mengambil keputusan menjadi wirausaha apabila telah mendapatkan peluang spesifik dalam dunia kewirausahaan. Berikut Gambar 4.1 sebagai potensi kewirausahaan pada periode tahun 2014 dan 2015 hasil survey yang dilakukan oleh GEM.



**Gambar 4.1 Potensi Kewirausahaan di ASEAN periode tahun 2014-2015**

Sumber : *ASEAN Regional Entrepreneurship Report, 2016*

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat dilihat Filipina memiliki tingkat tertinggi potensi peningkatan kewirausahaan. Hal ini diartikan bahwa masyarakat Filipina telah melihat peluang dan memiliki kemampuan untuk menjadi wirausaha. Lebih dari 38,6% dari 100% masyarakat Filipina berpotensi menjadi wirausaha pada tahun 2014 dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 44,2% dari 100% masyarakat Filipina. Sedangkan, Malaysia merupakan negara dengan tingkat terendah masyarakatnya untuk menjadi wirausaha.

Indonesia sendiri memiliki potensi yang tinggi sama dengan Negara Filipina. Sebesar 38,4% dari 100% masyarakat Indonesia berpotensi menjadi wirausaha pada tahun 2014 dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 44,4% dari 100% masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kewirausahaannya sedang berkembang, dapat dilihat pada Tabel 4.1 bahwa Indonesia masih dalam persentase rata-rata untuk tingkat kewirausahaan yang

dimiliki. Menjadi wirausaha merupakan keputusan yang didasarkan pada beberapa hal, salah satunya adalah minat untuk berwirausaha.

## **2. Minat Kewirausahaan**

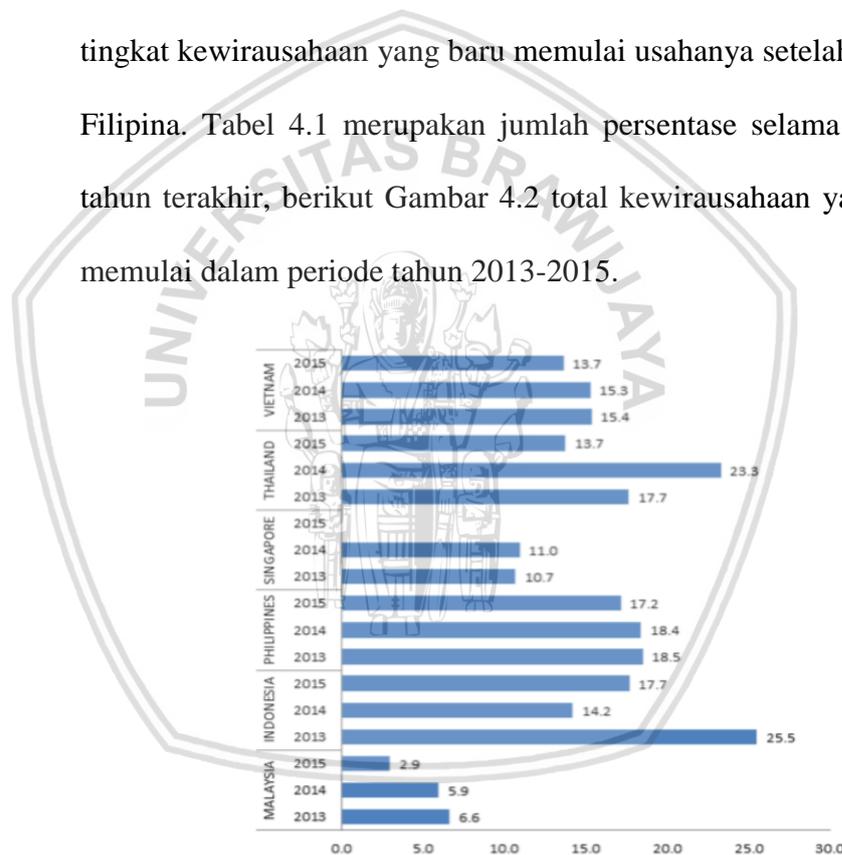
Golongan minat berwirausaha adalah masyarakat yang memiliki minat berwirausaha dalam 3 tahun kedepan, namun belum menjalankan wirausaha. Salah satu pertimbangan untuk menjadi wirausaha adalah dana atau modal, resiko, dan keuntungan yang akan didapatkan saat memulai wirausaha. Dilihat pada Tabel 4.1, minat kewirausahaan diukur pada persentase masyarakat usia 18-64 tahun atau usia produktif. Minat berwirausahaan berhubungan dengan perilaku kewirausahaan, seseorang memutuskan menjadi wirausaha dengan berbagai faktor.

Apabila seseorang memiliki minat kewirausahaan namun belum memiliki kemampuan dan peluang berwirausaha, kewirausahaan belum dapat dimulai. Namun apabila seseorang memiliki kemampuan dan peluang berwirausaha tetapi tidak memiliki minat untuk berwirausaha maka wirausaha belum dapat dimulai. Membangun kewirausahaan membutuhkan kedua aspek tersebut, yaitu minat dan potensi untuk berwirausaha.

## **3. Kewirausahaan Baru Memulai**

Kewirausahaan baru memulai merupakan implementasi atau keputusan seseorang untuk berwirausaha setelah memiliki potensi

dan minat berwirausaha. Minat atau potensi berwirausaha tidak menjamin seseorang untuk mengambil keputusan dan memulai kewirausahaan. Tingkat kewirausahaan baru adalah persentase populasi pada usia 18-64 tahun atau usia produktif yang telah memutuskan dan memulai menjadi wirausaha. Dilihat pada Tabel 4.1 Indonesia sebesar 17,7% menempati urutan ke-2 (dua) dalam tingkat kewirausahaan yang baru memulai usahanya setelah Negara Filipina. Tabel 4.1 merupakan jumlah persentase selama 3 (tiga) tahun terakhir, berikut Gambar 4.2 total kewirausahaan yang baru memulai dalam periode tahun 2013-2015.



**Gambar 4.2 Total Kewirausahaan yang Baru Memulai Periode Tahun 2013-2015**

Sumber : *The Global Entrepreneurship Monitor (GEM)*, 2015

Persaingan yang signifikan ada pada Negara Indonesia dan Thailand walaupun dengan persentase yang tinggi. Jumlah kewirausahaan yang baru memulai di Indonesia pada tahun 2013 dapat menutupi penurunan pada tahun 2014 yaitu 14,2%. Apabila

dilihat secara keseluruhan, Indonesia memiliki tingkat tertinggi jumlah kewirausahaan yang baru memulai usahanya. Berbeda dengan Indonesia dan Thailand, Malaysia dan Singapura memiliki jumlah kewirausahaan yang rendah dibanding rata-rata jumlah kewirausahaan yang baru memulai yaitu 14,7% di tahun 2014 dan 12% di tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa usia produktif di Negara Malaysia dan Singapura lebih memilih menjadi pasar pekerja dibandingkan membuat peluang usaha baru.

#### **4. Kewirausahaan yang Sedang Berkembang**

Kewirausahaan yang sedang berkembang adalah golongan usia produktif (18-64 tahun) yang sedang memiliki atau mengelola sebuah kewirausahaan yang memiliki upah gaji untuk diri sendiri maupun membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Dilihat pada Tabel 4.1 Thailand dan Vietnam adalah negara dengan jumlah terbanyak masyarakatnya menjadi wirausaha yang sedang berkembang yaitu sebesar 24,6% dan 19,6% dari jumlah populasi usia produktif.

Indonesia merupakan negara ketiga dengan 17,2% populasi usia dini yang telah memiliki dan mengelola kewirausahaan. Kewirausahaan yang sedang berkembang diartikan bahwa kewirausahaan telah memiliki pengaruh terhadap perekonomian negara yaitu penyerapan tenaga kerja dan distribusi pembangunan yang merata.

### **b. Jumlah Kewirausahaan di Negara Indonesia**

Kewirausahaan dalam penelitian ini dapat dilihat dari hasil sensus yang dilakukan oleh Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) dan diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang diterbitkan di website resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah kewirausahaan dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel dependen yang bertujuan untuk melihat pengaruh program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap kewirausahaan yang ada di Negara Indonesia.

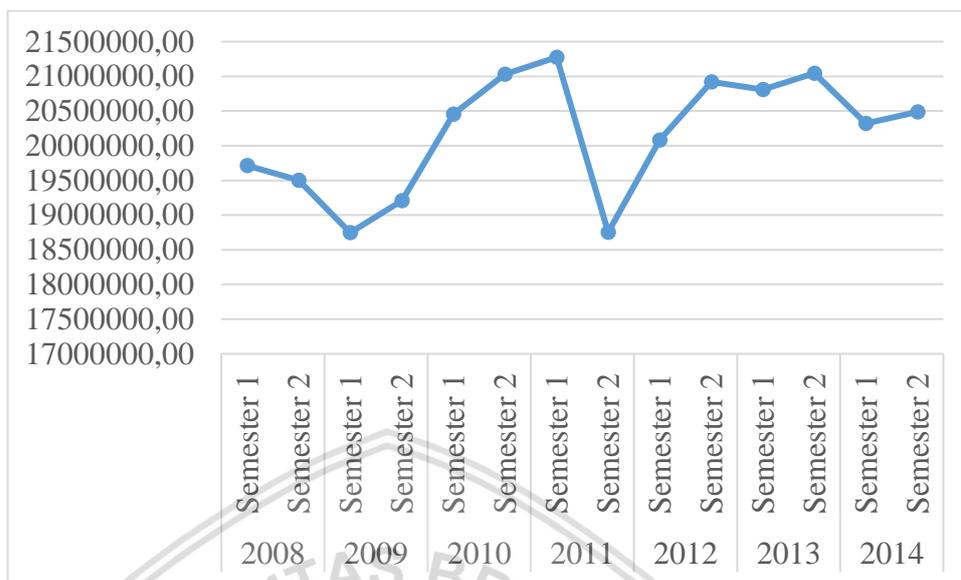
Jumlah kewirausahaan pada penelitian ini menggunakan data status pekerjaan utama masyarakat Indonesia, tingkat kewirausahaan dapat dilihat pada kategori profesi “Berusaha Sendiri” dalam periode tahun 2008-2014. Kategori “Berusaha Sendiri” dapat menunjukkan jumlah tingkat masyarakat yang memiliki profesi wirausaha setiap tahunnya dalam periode tahun 2008-2014. Berikut Tabel 4.2 dan Gambar 4.3 Kategori Profesi “Berusaha Sendiri” periode tahun 2008-2014.

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Indonesia yang Bekerja Secara Mandiri (Jiwa)**

Tahun	Periode	Jumlah
2008	Semester 1	19.715.878
	Semester 2	19.503.669
2009	Semester 1	18.746.535
	Semester 2	19.206.574
2010	Semester 1	20.456.735
	Semester 2	21.030.571
2011	Semester 1	21.275.734
	Semester 2	18.752.556
2012	Semester 1	20.081.133
	Semester 2	20.921.567
2013	Semester 1	20.810.300
	Semester 2	21.046.007
2014	Semester 1	20.320.671
	Semester 2	20.486.560
<b>Maksimum</b>		<b>21.275.734</b>
<b>Minimum</b>		<b>18.746.535</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>20168177.86</b>
<b>Standar Deviasi</b>		<b>856300.1266</b>

Sumber : Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), 2017

Tingkat kewirausahaan merupakan data yang berupa *time series* dari periode tahun 2008 sampai 2014 dengan data penelitian skala interval berasal dari kategori “Berusaha Sendiri” dari status pekerjaan utama masyarakat Indonesia. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat jumlah masyarakat Indonesia yang menjadi wirausaha setiap tahunnya sebagai berikut :



**Gambar 4.3 Jumlah Penduduk yang bekerja secara mandiri (jiwa) Periode Tahun 2008-2014**

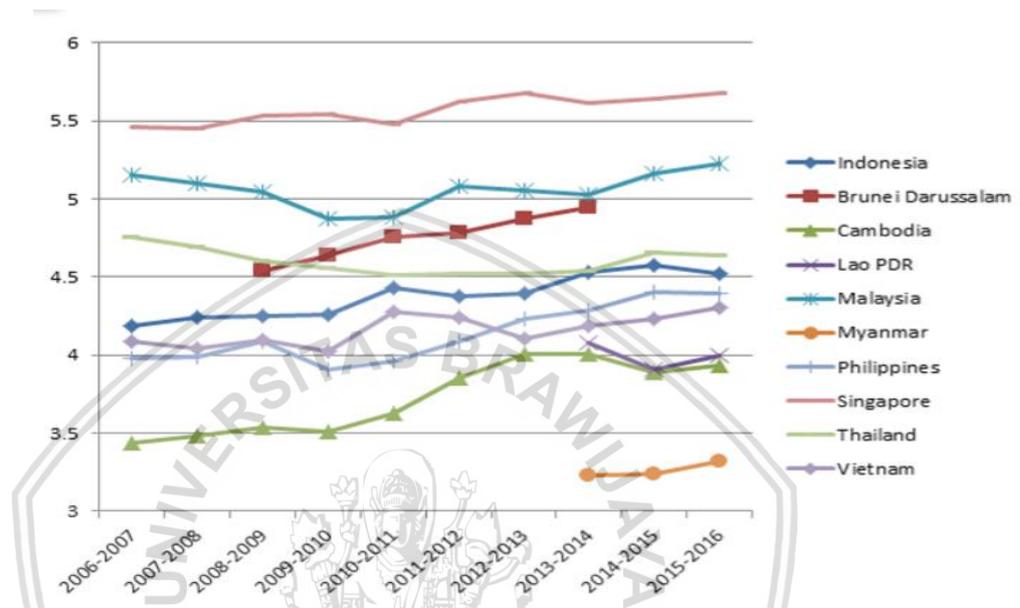
Sumber : Diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan Gambar 4.3 dapat dilihat pada periode 2009 semester 1 merupakan tahun terendah tingkat masyarakat Indonesia menjadi wirausaha yaitu sebanyak 18.746.535 jiwa, namun pada periode 2011 semester 1 mengalami peningkatan menjadi 21.275.734 jiwa masyarakat Indonesia yang mengambil keputusan untuk menjadi wirausaha. Mulai dari tahun 2012, semakin banyak masyarakat Indonesia yang memutuskan untuk menjadi wirausaha dan terus mengalami peningkatan.

**c. Daya Saing Kewirausahaan di ASEAN**

Berdasarkan klasifikasi yang dilakukan oleh GEM, Indonesia adalah negara yang masuk kedalam perekonomian yang didorong oleh efisiensi. Bertujuan untuk melihat perbandingan perekonomian Indonesia yang dipengaruhi oleh produktivitas kewirausahaan, berikut Gambar 4.4 hasil

dari survey tingkat daya saing di negara-negara ASEAN pada periode tahun 2006-2015 yang dilakukan oleh *The Global Entrepreneurship Monitor* (GEM).



**Gambar 4.4 Daya Saing Kewirausahaan di ASEAN periode tahun 2006-2015**

Sumber : *ASEAN Regional Entrepreneurship Report*, 2016

Berdasarkan Gambar 4.4 dapat dilihat ranking yang didapatkan antara negara-negara tersebut adalah sama yaitu Negara Singapura sebagai negara dengan daya saing pertama dan yang terakhir adalah Myanmar. Indonesia memiliki daya saing yang masih dalam tahap rata-rata, sama dengan Negara Thailand.

Tingkat kewirausahaan Indonesia semakin mendorong berbagai pihak untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat untuk menjadi wirausaha sehingga Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara di ASEAN. Oleh karena itu, pemerintah sebagai fasilitator utama negara mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mendukung masyarakat

menjadi wirausaha. Salah satu bentuk dukungan kebijakan pemerintah dalam memfasilitasi kewirausahaan adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

## **2. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

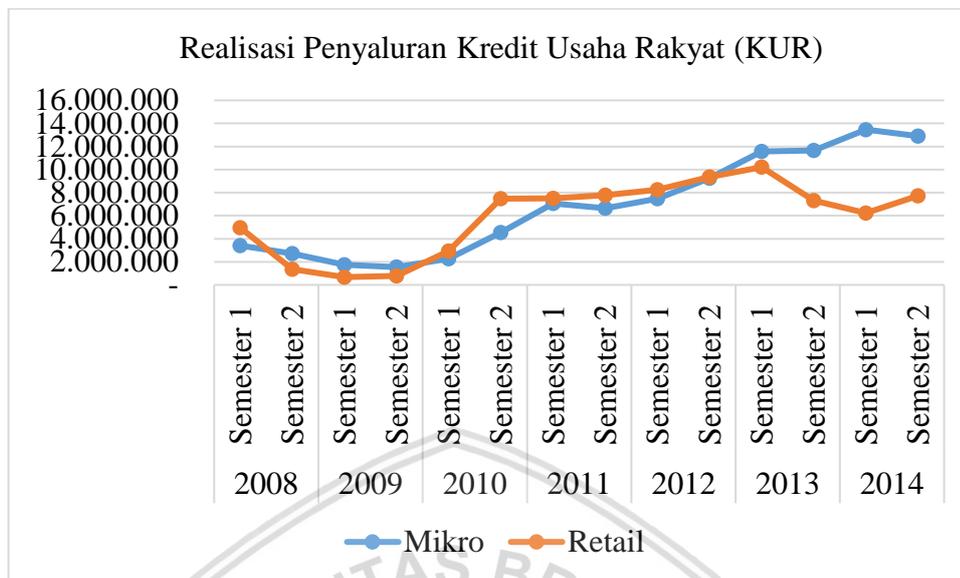
Realisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dibagi menjadi 2 (dua) sektor yaitu Mikro dan Ritel yang dinamakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel. Mekanisme penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki revolusi skema yaitu skema Imbal Jasa Pinjaman (IJP) pada periode tahun 2007-2014, pada tahun 2015 dilakukan evaluasi program sehingga dirubah menjadi skema Subsidi Bunga.

Perubahan skema yang dilakukan menjadi dasar penelitian apakah skema sebelumnya yaitu realisasi skema Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dapat meningkatkan tingkat kewirausahaan ataupun tidak. Penelitian ini menggunakan periode tahun 2008-2014, tidak menyertakan periode tahun 2014 dikarenakan pada tahun tersebut penyaluran program belum pada posisi yang stabil. Berikut Tabel 4.3 dan Gambar 4.5 Menunjukkan data Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat periode tahun 2008-2014.

**Tabel 4.3 Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Periode Tahun 2008-2014 (Rupiah)**

Tahun	Periode	Mikro	Ritel	Total
2008	Semester 1	3.416.601	4.961.303	8.377.904
	Semester 2	2.709.456	1.369.207	4.078.663
2009	Semester 1	1.749.943	676.154	2.426.097
	Semester 2	1.539.604	767.046	2.306.650
2010	Semester 1	2.277.743	2.944.559	5.222.302
	Semester 2	4.538.458	7.467.874	12.006.332
2011	Semester 1	7.063.207	7.511.724	14.574.931
	Semester 2	6.650.385	7.777.803	14.428.188
2012	Semester 1	7.474.515	8.241.710	15.716.225
	Semester 2	9.250.278	9.356.320	18.606.598
2013	Semester 1	11.572.275	10.208.408	21.780.683
	Semester 2	11.666.175	7.306.203	18.972.378
2014	Semester 1	13.467.060	6.231.164	19.698.224
	Semester 2	12.888.087	7.711.246	20.599.333
<b>Maksimum</b>		<b>13.467.060</b>	<b>10.208.408</b>	<b>21.780.683</b>
<b>Minimum</b>		<b>1.539.604</b>	<b>676.154</b>	<b>2.306.650</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>6.875.985</b>	<b>5.895.052</b>	<b>12.771.036</b>
<b>Standar Deviasi</b>		<b>4.308.833</b>	<b>3.207.217</b>	<b>7052402.27</b>

Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2017



**Gambar 4.5 Grafik Realisasi Penyaluran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Rupiah)**

Sumber : Diolah Peneliti, 2018

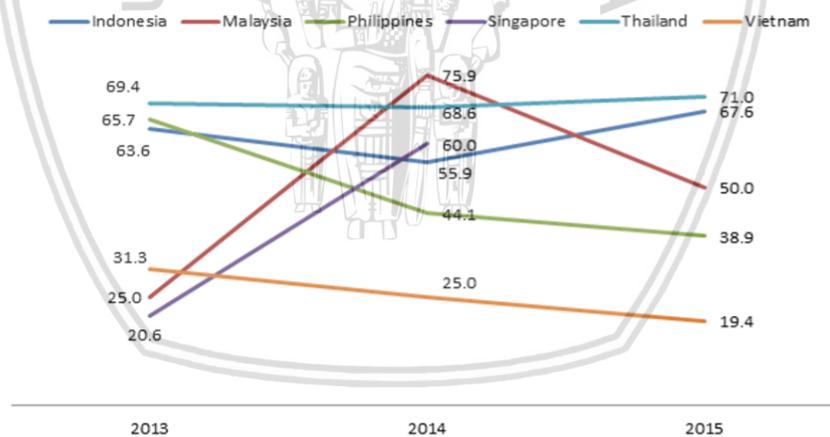
Berdasarkan Tabel 4.3 dan Gambar 4.5 dapat dilihat bahwa dalam realisasi penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) paling besar diberikan pemerintah untuk sektor mikro adalah pada tahun 2014 semester 1 yaitu sekitar bulan Januari – Juni sebesar Rp 13.467.060,- sedangkan penyaluran terbesar dalam sektor ritel berada pada tahun 2013 semester 1 yaitu sekitar bulan Januari – Juni sebesar Rp 10.208.408,-. Penyaluran terendah yang dilakukan oleh pemerintah dalam sektor mikro yaitu pada tahun 2009 semester 2 pada bulan Juli – Desember sebesar Rp 1.539.604,- dan dalam sektor ritel penyaluran terendah adalah pada tahun 2009 semester 1 sebesar Rp 676.154,-.

Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2009 penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengalami penurunan dalam sektor mikro maupun ritel. Rata-rata yang dimiliki selama periode tahun 2008-2014 dalam penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam sektor mikro adalah sebesar Rp 6.875.985,-

dengan standar deviasi 4.308.833, sedangkan dalam sektor ritel memiliki rata-rata sebesar Rp 5.895.052,- dengan standar deviasi 3.207.217.

### 3. Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) Sebagai Manifestasi Dukungan Keuangan (*Financial*) Bagi Wirausaha

Masalah keuangan merupakan masalah krusial dalam kewirausahaan karena berhubungan dengan permodalan dan operasional usaha. Akses keuangan merupakan salah satu faktor mendesak dalam negara-negara ASEAN (Schwab and Sala-i-Martin, 2014). Studi GEM menghasilkan wirausaha mengalami masalah keuangan di 6 (enam) Negara ASEAN pada periode tahun 2013-2015, Gambar 4.6 menunjukkan 6 (enam) Negara ASEAN yang mengalami masalah keuangan periode tahun 2013-2015.



**Gambar 4.6 Masalah Keuangan Wirausaha di 6 (enam) Negara ASEAN periode Tahun 2013-2015**

Sumber : *ASEAN Regional Entrepreneurship Report (2016)*

Berdasarkan Gambar 4.6, masalah keuangan tertinggi yang pernah dialami oleh ke-6 (enam) negara di ASEAN pernah dilalui oleh Malaysia yaitu dengan 75,9% wirausaha mengalami masalah keuangan. Angka terendah dimiliki

Vietnam untuk persentase wirausaha yang mengalami masalah keuangan dan tahun ketiga mengalami penurunan sampai kepada angka 19,4%. Sedangkan Indonesia merupakan negara dengan angka masalah keuangan wirausaha yang tinggi yaitu pada tahun 2013 dengan persentase 65,7% walaupun sempat turun ditahun 2014, Indonesia mengalami peningkatan persentase pada tahun 2015 menjadi 67,6%. Berdasarkan persentase tersebut dapat dipahami bahwa masalah keuangan adalah salah satu masalah krusial dalam peningkatan kewirausahaan di Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang dianggap mampu mendorong munculnya kewirasusahaan adalah dukungan pembiayaan, maka pemerintah RI mendesain program Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini dimulai pada tahun 2007. Penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah berjalan selama 11 (sebelas) tahun, namun pada tahun 2014 program ini dilakukan evaluasi. Pada awal 2015 program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimulai kembali dengan beberapa perbaikan berdasarkan putusan hasil rapat koordinasi menteri yang diadakan pada tanggal 15 Desember 2014.

**a. Pengelola Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Kementerian koordinator bidang perekonomian Indonesia merupakan instansi pemerintahan yang mengeluarkan kebijakan dan pengelola utama program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai upaya memfasilitasi kewirausahaan di Negara Indonesia, oleh karena itu kementerian koordinator bidang perekonomian digunakan sebagai lokasi pengambilan

data dari variabel bebas (program Kredit Usaha Rakyat (KUR)) dalam penelitian ini. Kementerian

Beberapa perbaikan mengenai program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan evaluasi Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang salah satunya menyatakan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum memiliki ketepatan sasaran program. Beberapa perbaikan yang dimaksud antara lain, perbaikan regulasi dan perbaikan skema program. Melalui rapat koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM tanggal 13 Mei 2015 maka disepakati bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki suku bunga untuk *end user* sebesar 21% per tahun. Hal ini didukung dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diresmikan pada tanggal 25 Mei 2015.

Pada tanggal 16 Juni 2015 Kementerian memutuskan untuk menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 12% per tahun berdasarkan pada Rapat Kabinet Terbatas. Sebagai pematangan kebijakan tersebut, komite kebijakan melakukan kajian kembali untuk menentukan bentuk dan besaran subsidi yang sesuai dengan tujuan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui rapat koordinasi komite kebijakan pembiayaan bagi UMKM tanggal 16 Juni 2015, diputuskan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan disalurkan dalam 2 sektor yaitu Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Kredit Usaha Rakyat Ritel.

Mulai tahun 2015 bentuk subsidi yang diberikan pemerintah dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah subsidi bunga dengan penyalurannya melalui bank-bank yang telah ditentukan seperti Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki pendanaan untuk TKI, namun sampai saat ini penyaluran pembiayaan bagi TKI masih dalam pengkajian. Oleh karena itu, penelitian ini hanya akan meneliti dalam sektor Mikro dan Ritel.

Saat pelaksanaan kembali program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Oktober 2015, pemerintah melakukan evaluasi kembali sebagai upaya meningkatkan dan memperluas pelaksanaan penyaluran program serta alokasi plafon tahunan yang dapat dicapai secara optimal. Beberapa regulasi yang dikeluarkan yaitu Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 188 Tahun 2015 tentang penetapan penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Peraturan-peraturan tersebut menjadi pedoman hukum baru dalam pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) disalurkan dalam 2 (dua) bentuk yaitu Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Kredit Usaha Rakyat Ritel. Kredit Usaha Rakyat Mikro pada periode tahun 2007-2014 disalurkan dengan plafon kredit sampai dengan Rp 25 juta per debitur dengan subsidi bunga 10% termasuk Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Sedangkan Kredit Usaha Rakyat Ritel disalurkan dengan plafon diatas Rp 25 juta dengan maksimum

Rp 500 juta per debitur dengan subsidi bunga 4,5% termasuk Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Setiap besarnya Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan *collection fee* sesuai pada perundingan antara penyalur dan perusahaan penjamin.

Penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dibagi berdasarkan sektor ekonomi melalui 33 Bank di seluruh provinsi di Negara Indonesia. Sektor-sektor yang dapat dibiayai oleh program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu sektor konstruksi, sektor jasa, sektor pertanian, sektor pemburuan, kehutanan, sektor perikanan, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan.

**b. Penyaluran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Penyaluran program Kredit Usaha Rakyat dibagi menjadi 2 (dua) skema, seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perubahan skema penyaluran program Kredit Usaha Rakyat dilakukan karena adanya evaluasi program yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Pengawas Keuangan (BPK), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Berikut kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam skema Imbal Jasa Penjaminan (IJP) :

Penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum dapat dinilai ketepatan sarannya walaupun sudah menggunakan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang termasuk kedalam kelompok anggaran subsidi.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah produk bank yang masih dijalankan dengan logika perbankan, sehingga program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diberikan kepada wirausaha yang hanya dianggap “prospektif” berdasarkan pada penglihatan perbankan. Adanya kelemahan yang didapatkan dari skema Imbal Jasa Penjaminan, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengganti skema penyaluran menjadi skema subsidi bunga, namun skema subsidi bunga masih memiliki kelemahan yaitu, porsi penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) didominasi oleh sektor perdagang.

Pemerintah telah memberikan berbagai akses kepada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan berbagai skema yang memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing serta selalu melakukan evaluasi program. Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti bagaimana pengaruh langsung dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada kewirausahaan, apakah dapat meningkatkan masyarakat untuk menjadi wirausaha ataupun tidak.

### **c. Mekanisme Penyaluran Program Kredit Usaha Rakyat**

Mekanisme penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dibagi berdasarkan pada beberapa golongan yaitu Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bank Umum Swasta, Pembiayaan, Koperasi, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah. Bank Badan Usaha Milik Rakyat (BUMN) yang menyalurkan program Kredit Usaha Rakyat adalah Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, dan Bank BRI.

Mekanisme penyaluran program melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat diakses melalui BPD seluruh Provinsi Negara Indonesia.

Penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga dapat diakses melalui Bank Umum Swasta yaitu Bank BCA, Bank Bukopin, Bank MayBank Indonesia, Bank Sinarmas, Bank Permata, Bank BTPN, Bank OCBC NISP, Bank Artha Graha, Bank BRI Agroniaga, Bank CTBC. Sedangkan wirausaha dalam sektor produksi dapat mengakses program Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Adira Finance, Mega Central Finance, BCA Finance, dan FIF. Pemerintah memberikan akses lain kepada wirausaha untuk dapat mengakses program Kredit Usaha Rakyat dengan mekanisme melalui Koperasi yaitu Koperasi Obor Mas dan Koperasi Kospin Jasa, serta akses kepada Kredit Usaha Rakyat Syariah yaitu melalui Bank BRI Syariah.

Penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilakukan melalui Bank-Bank yang telah dijabarkan sebelumnya. Pemerintah merupakan pihak yang mengelola subsidi dana kepada bank, proses mendapatkan pembiayaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan regulasi yang ditetapkan oleh masing-masing bank ([www.kur.ekon.go.id/bank-bni](http://www.kur.ekon.go.id/bank-bni)). Berikut mekanisme yang dilakukam Bank BNI yang dibagi menjadi BNI-Kredit Usaha Rakyat, BNI Wirausaha, dan Kredit Kepada Lembaga Keuangan (KKLK) :

### 1. BNI-Kredit Usaha Rakyat

BNI-Kredit Usaha Rakyat memberikan fasilitas kredit sampai dengan Rp 500 juta untuk usaha produktif dalam bentuk kredit modal kerja dan kredit investasi dengan jangka waktu kredit maksimal 5 tahun.

Persyaratan Umum :

- Warga Negara Indonesia (WNI);
- Usaha telah berjalan minimal 1 (satu) tahun;
- Mengisi formulir aplikasi dengan melampirkan fotokopi kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri, Surat Nikah (bagi yang telah menikah), Surat izin usaha, dan NPWP untuk kredit diatas Rp 50 juta.

### 2. BNI Wirausaha

BNI Wirausaha adalah fasilitas kredit di atas Rp 50 juta sampai dengan Rp 1 milyar yang diberikan untuk usaha produktif dalam bentuk kredit modal kerja dan kredit investasi dengan jangka waktu kredit maksimal 5 tahun.

Persyaratan Umum :

- Warga Negara Indonesia (WNI);
- Wirausaha telah berjalan minimal 1 tahun;
- Mengisi formulir aplikasi dengan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri, Surat nikah (bagi yang telah menikah), Surat izin usaha, NPWP, Sertifikat jaminan atau PBB tahun terakhir, BPKB dan SHPTU.

### 3. Kredit Kepada Lembaga Keuangan (KKLK)

KKLK adalah fasilitas kredit yang disalurkan kepada Lembaga Keuangan (BPR dan Koperasi) untuk dipinjamkan kepada *end user* dengan pola *executing*. Sasaran pembiayaannya adalah BPR dan Koperasi (koperasi simpan pinjam dan koperasi pegawai yang memiliki unit simpan pinjam) dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun

Persyaratan untuk BPR :

- BPR telah berjalan selama minimal 3 (tiga) tahun;
- Memiliki perizinan sesuai dengan bidang usaha;
- Lembaga dan kepengurusan tidak tergolong kedalam daftar coret (*black list*) di Bank Indonesia;
- Menunjukkan rincian kualitas CAMEL yang sesuai dengan nilai Tingkat Kesehatan Bank (TKS) dari Bank Indonesia dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan keterangan minimal Cukup Sehat;
- *Non Performing Loan* (NPL) maksimal 5%.

Persyaratan untuk Koperasi :

- Koperasi telah berjalan minimal 3 (tiga) tahun;
- Jenis koperasi merupakan koperasi simpan pinjam atau koperasi yang memiliki unit simpan pinjam;
- Koperasi pegawai/karyawan harus memiliki induk perusahaan swasta/instansi pemerintah atau multinasional yang memiliki reputasi baik;
- Memiliki perizinan sesuai dengan bidang usaha;

- Lembaga dan kepengurusan tidak tergolong kedalam daftar coret (*black list*) di Bank Indonesia;
- Telah menjadi nasabah Bank BNI atau bank lain minimal 6 (enam) tahun;
- NPWP atas nama koperasi.

#### **d. Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program yang dilakukan pemerintah dalam meminjamkan pembiayaan/permodalan kepada pelaku wirausaha melalui perantara pihak perbankan. Mendapatkan pinjaman berupa program Kredit Usaha Rakyat wirausahaan harus memiliki kriteria tertentu yaitu merupakan jenis usaha yang produktif dan layak (*feasible*), tetapi tidak mampu dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan perbankan (belum *bankable*).

Usaha produktif yang berarti bahwa usaha tersebut memiliki kegiatan produksi barang atau jasa dengan tujuan memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan wirausaha. Usaha layak (*feasible*) adalah usaha yang dapat memberikan keuntungan kepada wirausaha sehingga wirausaha dapat dinyatakan mampu membayar tagihan/hutang pada lembaga pemberi Kredit Usaha Rakyat (KUR), seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemberian pinjaman dana yang berarti wirausaha tetap memiliki tanggung jawab agunan dan pengembalian dana yang telah dipinjamkan namun bunga

dari pinjaman yang diajukan dapat dibantu oleh program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Usaha yang disebut belum memenuhi syarat bank (bankable) bahwa usaha tersebut belum dapat memenuhi persyaratan pengajuan pinjaman ke bank, yang berarti bahwa wirausaha yang mengajukan tidak memiliki jaminan/aguan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Pemberian pinjaman pola penjaminan (IJP) sesuai dengan sektor usaha. Sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan industri kecil jaminan bernilai 80% dari plafon kredit, sedangkan faktor lainnya bernilai 70% dari plafon kredit. Wirausaha yang mengajukan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki persyaratan dalam lolos untuk menjadi kreditor, persyaratan yang ditentukan adalah persyaratan minimum lama usaha yang diajukan. Hal yang harus diperhatikan lainnya dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah jangka waktu pencairan dana oleh Bank untuk wirausaha.

## **B. Analisis Inferensial**

### **1. Uji Asumsi Klasik**

Setelah analisis deskriptif yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, selanjutnya adalah uji asumsi klasik yang berisi uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Uji asumsi klasik dibutuhkan untuk mendapatkan model regresi yang baik. Sebelum melakukan model regresi, data harus lolos dalam uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dibutuhkan untuk memperoleh data

yang tidak bias dan dapat dilanjutkan menggunakan statistik parametrik atau nonparametrik. Berikut hasil uji asumsi klasik dalam penelitian in :

**a) Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui penyebaran nilai residual kedua variabel yang terdistribusi normal ataupun tidak, sedangkan model regresi yang baik memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Penelitian ini menggunakan uji normalitas Kolmogorov- Smirnov, dengan ketentuan nilai signifikan dapat dikatakan normal apabila bernilai  $> 0,05$  dan dianggap *abnormal distribution* apabila bernilai  $< 0,05$ . Berikut Tabel 4.4 hasil dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov :

**Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		14
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	675306.5388
Most Extreme Differences	Absolute	.152
	Positive	.152
	Negative	-.152
Kolmogorov-Smirnov Z		.569
Asymp. Sig. (2-tailed)		.902

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Diolah Peneliti, 2018 (Lampiran 1)

Data regresi dapat dikatakan normal apabila nilai residual terdistribusi secara normal. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.3 bahwa nilai residual sama dengan *Asymp. Sig. (2-Tailed)*  $> 0,05$  yaitu 0,902 atau dapat dikatakan nilai

residual atau *Asymp. Sig.* pada data penelitian ini lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa data yang akan diuji telah terdistribusi normal dan lolos uji normalitas.

#### b) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adanya masalah autokorelasi ataupun tidak dalam model regresi. Uji autokorelasi adalah syarat yang harus dipenuhi dalam analisis regresi linier. Model regresi yang baik tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi. Adanya gejala autokorelasi biasa terdapat dalam penelitian *time series* karena bertujuan untuk mengetahui korelasi antara deret waktu saat ini dengan deret waktu sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian *time series* dengan uji Durbin-Watson (DW-test). Hasil perhitungan uji autokorelasi Durbin-Watson sebagai berikut :

**Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson**

Model	Durbin-Watson
1	1,832

Sumber : Diolah Peneliti, 2018 (Lampiran 2)

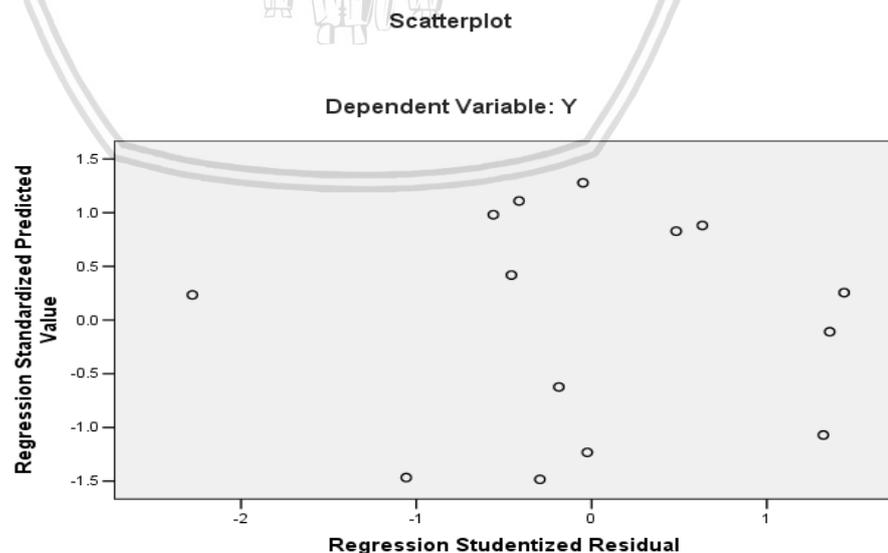
Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui bahwa nilai uji Durbin-Watson adalah 1,832 yang terletak antara  $d_U = 1,350$  dan  $4-d_U = 2,650$  untuk  $n = 14$  dan  $k = 1$ . Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak memiliki gejala autokorelasi dan dapat dilanjutkan.

#### c) Uji Heterokedastisitas

Bagian dari uji asumsi klasik adalah uji Heterokedastisitas yang bertujuan untuk menguji model regresi yang mengalami ketidaksamaan

*varian* dari residual 1 (satu) pengamatan dengan pengamatan lain. Model regresi yang baik yaitu tidak memiliki gejala heterokedastisitas. Jika terjadi gejala heterokedastisitas maka akan berakibat pada sebuah keraguan atau ketidak akuratan pada hasil analisis regresi yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan uji *Scatterplot* dan didukung oleh uji *Glejser* bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan pasti.

Ketentuan uji *Scatterplot* adalah titik-titik data menyebar diatas, dibawah ataupun disekitar angka 0 dan penyebaran data membentuk sebuah pola maka diartikan memiliki gejala heterokedastisitas. Sedangkan ketentuan uji *Glejser* adalah jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka diartikan tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Berikut Gambar 4.7 hasil dari uji heterokedastisitas *Scatterplot* dan Tabel 4.6 hasil dari uji heterokedastisitas *Glejser* :



**Gambar 4.7 Hasil Uji Heterokedastisitas *Scatterplot***

Sumber : Diolah Peneliti, 2018 (Lampiran 3)

Berdasarkan Gambar 4.7 dapat disimpulkan penelitian ini tidak memiliki gejala heterokedastisitas karena titik-titik tidak memiliki distribusi yang merata, tidak membentuk pola, dan tidak berkumpul pada bagian atas, bawah, maupun mendekati angka 0. Maka penelitian ini lolos dalam uji heterokedastisitas. Bertujuan untuk mendapatkan kepastian yang lebih akurat, penelitian ini melakukan uji heterokedastisitas *Glejser* dengan hasil yang akan ditunjukkan pada Tabel 4.6 Sebagai berikut :

**Tabel 4.6 Hasil Uji Heterokedastisitas *Glejser***

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	534652.8	258044.8		2.072	.060
	X	-.003	.018	-.048	-.167	.870

a. Dependent Variable: AbsRes

Sumber : Diolah Peneliti, 2018 (Lampiran 3)

Uji heterokedastisitas *Glejser* menunjukkan hasil menggunakan angka, berbeda dengan uji heterokedastisitas *Scatterplot*. Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan hasil signifikan (*Sig.*) penelitian ini sebesar 0,870 yang berarti lebih besar dari ( $>0,05$ ) dan dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini tidak memiliki gejala heterokedastisitas dan dapat dilanjutkan.

## 2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Uji regresi linier sederhana bertujuan untuk menguji pengaruh 1 (satu) variabel bebas dengan 1 (satu) variabel terikat. Sebelum melakukan uji regresi linier sederhana, data yang digunakan harus lolos uji asumsi dasar yaitu uji normalitas dan linieritas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, data penelitian ini telah lolos dalam uji asumsi dasar. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui besarnya pengaruh antara program Kredit Usaha Rakyat (KUR) (X) terhadap Tingkat Kewirausahaan (Y). Berikut hasil analisis regresi linier sederhana pada penelitian ini yang akan ditampilkan pada Tabel 4.7 :

**Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana**

<b>t Test</b>					
<b>Variabel</b>	<b>Regression Coefficients (Standardized)</b>	<b>t hitung</b>	<b>t tabel</b>	<b>Sig.</b>	<b>Keterangan</b>
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) (X)	0,615	2,701	2,179	0,019	Signifikan
R = 0,615					
R Square = 0,378					
Adjusted R Square = 0,326					

Sumber : Diolah Peneliti, 2018 (Lampiran 4)

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dijelaskan persamaan model regresi linier sederhana dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = 0,615 X$$

Persamaan model regresi linier sederhana pada penelitian ini dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien regresi variabel bebas (program Kredit Usaha Rakyat (KUR)) sebesar 0.615 dan constant = 0 karena perhitungan menggunakan Beta Y = 0,615. Nilai tersebut menunjukkan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai wujud kebijakan pemerintah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kewirausahaan yang berarti apabila realisasi penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) meningkat 1%, maka tingkat kewirausahaan akan mengalami peningkatan sebesar 0,615. Namun apabila nilai penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) menurun 1%, maka tingkat kewirausahaan akan mengalami penurunan sebesar 0,615.

### 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel bebas (program Kredit Usaha Rakyat (KUR)) terhadap variabel terikat (tingkat kewirausahaan). Hasil koefisien determinasi pada penelitian ini akan ditunjukkan pada Tabel 4.8 sebagai berikut :

**Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>
0.615	0.378	0.326

Sumber : Diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan Tabel 4.8 Menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki R square sebesar 0,378. Dapat disimpulkan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki pengaruh terhadap tingkat kewirausahaan di Indonesia

sebesar 37,8%. Sedangkan sisanya sebesar 62,2% (100% - 16,8%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Nilai koefisien korelasi (R) pada penelitian ini sebesar 0,615 yang diartikan bahwa variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini memiliki hubungan linier kuat.

#### 4. Uji Parsial (*t*)

Uji parsial bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap variabel terikat yaitu tingkat kewirausahaan. Hasil dari uji parsial dalam penelitian ini (Tabel 4.7) menunjukkan bahwa nilai signifikan (*Sig. t*) dari variabel program Kredit Usaha Rakyat (KUR) lebih kecil dari taraf nyata 0,05 ( $0,019 < 0,05$ ) dan  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2.701 > 2.179$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kewirausahaan di Indonesia.

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berikut pembahasan hipotesis berdasarkan pengujian statistik yang telah dilakukan dan dijelaskan pada bagian sebelumnya :

Hipotesis : Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai wujud Kebijakan Pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kewirausahaan di Indonesia.

Teori Schumpeter dalam Sukirno (2012,434) mengatakan bahwa wirausaha memiliki peranan penting dalam mewujudkan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Peran kewirausahaan dalam pertumbuhan perekonomian negara adalah sebagai aktor yang terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan perekonomian. Namun, dalam kegiatan berinovasi akan memerlukan investasi. Dalam teori Schumpeter wirausaha berperan sebagai pihak yang terus berinovasi untuk mendapatkan keuntungan sehingga akan meminjam modal dan melakukan penanaman modal. Schumpeter juga membagi investasi menjadi 2 (dua) golongan: penanaman modal otonomi dan penanaman modal terpengaruh.

Jackson mengatakan bahwa kewirausahaan membutuhkan dukungan akurat dari pemerintah agar dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian negara. Pada awalnya dukungan pemerintah sering diabaikan oleh wirausaha, namun dengan berjalannya waktu dan segala usaha pemerintah dalam memperkenalkan program-program yang dimiliki, pemerintah dan wirausaha dapat bekerja sama dengan saling menguntungkan (Ács, Zoltán J., Erkkó Autio., László Szerb, 2013). Kebijakan dalam meningkatkan kewirausahaan diatur oleh pemerintah dalam hal keuangan/permodalan, pajak, regulasi perdagangan, dan aktivitas peningkatan inovasi (Minniti, 2008).

Berdasarkan teori Schumpeter, Jackson, dan Minniti dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan memiliki pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. suatu negara memiliki pemerintahan sebagai pengelola dan mengatur wewenang negara. Pemerintah akan merumuskan kebijakan yang

dapat mempengaruhi kesejahteraan negara tersebut. Meningkatkan wirausaha merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mensejahterakan negara dalam perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memiliki kebijakan permodalan kewirausahaan berupa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian ini memperlemah dan kontradiktif dengan penelitian terdahulu oleh Simatupang, Zain, Thoyib (2009) dengan hasil penelitian bahwa kebijakan pemerintah terhadap tingkat kewirausahaan tidak memiliki pengaruh signifikan. Hasil penelitian Simatupang, Zain, Salim, Thoyib (2009) yang menyatakan kebijakan pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kewirausahaan didasarkan pada hasil penelitian kepada petani kelapa sawit yang tidak mengetahui secara pasti setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah karena kurangnya sosialisasi program.

Hasil penelitian ini memperkuat dan mendukung penelitian terdahulu yaitu Obaji *and* Olugu (2014) dengan hasil tingkat kesuksesan kewirausahaan di beberapa negara sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dengan program-program pengembangan dalam bidang infrastruktur, keuangan, dan kebijakan fiskal. Selain itu, penelitian hasil penelitian ini memperkuat Minniti (2008) bahwa kebijakan pemerintah membuat kebijakan berupa keuangan/permodalan dalam meningkatkan kewirausahaan.

Berdasarkan hasil uji  $t$  dan nilai signifikansi pada Tabel 4.7, variabel program Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara parsial berpengaruh signifikan

positif terhadap tingkat kewirausahaan. Upaya pendanaan atau pemodalan menggunakan skema Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang dilakukan oleh pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Masyarakat mendapatkan pemodalan sebagai hal utama dalam memulai wirausaha. Pengeluaran dana APBN sekitar Rp 16,6 triliun dapat menggerakkan penyaluran pembiayaan perbankan kepada wirausaha (Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, 2017).

Berdasarkan pada *The Global Entrepreneurship Monitor* (GEM), pemerintah menjadi faktor penting dalam aktivitas kewirausahaan suatu negara. Salah satu peran pemerintah adalah mempermudah jalannya wirausaha dan mengurangi beban birokrasi. Pemerintah tidak menjalankan wirausaha namun menjadi pengaruh penting dalam ekosistem pendukung aktivitas kewirausahaan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menguntungkan kedua pihak (*ASEAN Regional Entrepreneurship Report*, 2016).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini meneliti variabel independen yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan variabel dependen yaitu Tingkat Kewirausahaan di Indonesia, studi pada periode tahun 2008 sampai dengan 2014. Berdasarkan rumusan masalah dan hasil dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu kebijakan pemerintah yang berupaya dalam meningkatkan kewirausahaan di Indonesia dengan memberikan permodalan usaha. Implementasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah berjalan dari tahun 2007 sampai saat ini. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki 2 (dua) skema, tahun 2007-2014 diberlakukan skema Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan tahun 2015 sampai saat ini diberlakukan skema subsidi bunga. Revolusi skema program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilakukan karena adanya evaluasi yang dilakukan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM.
2. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif dan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kewirausahaan di Indonesia. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu dan fenomena serta kondisi kewirausahaan di Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan mampu bermanfaat bagi peneliti dan pihak lain yang bersangkutan dengan penelitian ini. Adapun saran yang dapat diberikan antara lain :

### **a. Saran Praktis**

1. Pemerintah dan institusi lain diharapkan untuk dapat mengkaji dan mengevaluasi ketepatan sasaran dari setiap program terkait kewirausahaan, serta menyusun dan menyediakan data yang lebih relevan seperti membedakan data kewirausahaan menjadi wirausaha mikro, makro, dan ritel sesuai dengan syarat dalam membedakan jenis wirausaha. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas program lain dalam hal permodalan kewirausahaan selain skema yang membuat wirausaha harus mengambil kredit.
2. Masyarakat umum diharapkan untuk dapat mempertimbangkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai sarana permodalan dalam berwirausaha. Serta mendaftarkan setiap usahanya ke badan pemerintahan untuk dapat didata sesuai dengan jenis usaha.

### **b. Saran Teoritis**

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk dapat mengidentifikasi korelasi dari masing-masing variabel dan mencari variabel lain (variabel alternatif) dalam bentuk lain dari kebijakan pemerintah dalam kewirausahaan seperti pajak, regulasi perdagangan, dan aktivitas

peningkatan inovasi seperti yang dikatakan Minniti (2008:782) untuk variabel independen sebelum melakukan penelitian dengan sampel yang lebih spesifik. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Purwatiningsih (2015) yang meneliti Program Kredit Usaha Rakyat berfokus pada kewirausahaan sektor pertanian di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.

2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran untuk penelitian selanjutnya mengenai keterbatasan dalam penelitian ini yaitu data kewirausahaan yang didapatkan untuk variabel dependen belum terklasifikasikan secara spesifik menjadi wirausaha mikro, makro, ataupun ritel dengan menggunakan metode penelitian yang sesuai variabel yang digunakan. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Tingkat Kewirausahaan ataupun penelitian lain diluar dari variabel yang sudah ada sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Tri Siwi. 2015. *Kewirausahaan Teori dan Penerapan pada Wirausaha dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Algifari. 2009. *Analisis Statistik untuk Bisnis dengan Regresi, Korelasi, dan Nonparametrik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE.
- Alma, Buchari. 2016. *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.
- Ghozali, Imam. 2016. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar N dan Dawn C. Porter. 2015. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Edisi Kelima. Dialihbahasakan oleh Eugenia Mardanugraha, Sita Wardhani, dan Carlos Mangunsong. Jakarta: Salemba Empat.
- Hendro. 2011. *Dasar – dasar Kewirausahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Irawan dan Suparmoko. 2012. *Ekonomika Pembangunan*. Edisi Keenam. Yogyakarta: BPFE.
- Juliandi, A. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Medan: Umsu Press.
- Marbun, B.N. 1996. *Manajemen Perusahaan Kecil: Dilengkapi Undang-Undang tentang Usaha Kecil*. Jakarta: Pustaka Binaman Presindo.
- Murti, Sumarni dan Salamanah Wahyuni. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: ANDI.
- Santoso, Singgih. 2012. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sinungan, Muchdarsyah. 2005. *Produktivitas: Apa dan Bagaimana*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soenarko. 2003. *Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

———. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, Sadono. 2012. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.

Suryana. 2008. *Kewirausahaan Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat.

Zimmerer, thomas. Scarborough, norman dan wilson, doug. Tanpa tahun. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Dialihbahasakan oleh Kwary dan Fitriasari. 2008. Jakarta: Salemba Empat.

### **Jurnal**

Ács, Zoltán J., Erkkó Autio., László Szerb. 2013. National System of Entrepreneurship: Measurement Issues and Policy Implications. *Research Policy*, Vol. 43, Pages 476-494.

Djakov, Simeon., Rafael La Porta., Florencio Lopez-de-Silanes., Andrei Shleifer. 2002. The Regulation of Entry. *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 117, Issue 1, Pages 1-37.

Fu'adi, I. F., Budiarmo Eko., dan Murdani. 2009. Hubungan Minat Berwirausaha dengan Prestasi Praktik Kerja Industri Siswa Kelas XII Teknik Otomotif SMK Negeri 1 Adiwena Kabupaten Tegal. *Jurnal PTM*, Vol. 9, No. 2, Hal. 92-98.

Harrison, Richard T, Colin M.M and Paul Girling, 2004. Financial Bootstrapping and Venture Development in The Software Industry. *Entrepreneurship & Regional Development*, Vol. 16, Pages 307-333.

Khoja, Faiza and Shabnam Lutafali. 2008. Micro-Financing: An innovative application of social networking. *Ivey Business Journal*, Vol. 72, Issue 1, Pages 1-9.

- Kozan, M. Kamil, Dolun Öksoy, Onur Özsoy. 2006. Growth plans of small businesses in Turkey: Individual and environmental influences. *Journal of Small Business Management*, Vol. 44, Issue 1, Pages 114-129.
- Minniti, Maria. 2008. The Role of Government Policy on Entrepreneurial Activity: Productive, Unproductive, or Destructive?. *Entrepreneurship Theory and Practice*, Baylor University. Pages 779-790.
- Obaji, Nkem Okpa and Mercy Uche Olugu. 2014. The Role of Government Policy in Entrepreneurship Development. *Science Journal of Business and Management*, Vol. 2, No. 4, Pages 109-115.
- Putra, Rano Aditia. 2012. Faktor-faktor Penentu Minat Mahasiswa Manajemen untuk Berwirausaha (Studi pada Manajemen FE Universitas Negeri Padang). *Jurnal Manajemen*, Vol. 1, No. 1, Hal. 1-15.
- Rosenberg, Nathan and Richard Nelson. 1994. American Universities and Technical Advance in Industry. *Research policy*, Vol. 23, Issue 3, Pages 323-348.
- Simatupang, Hinsatopa., Djumilah Zain., Ubud Salim., Armanu Thoyib. 2009. Pengaruh Kebijakan Pemerintah, Kewirausahaan (Entrepreneur) terhadap Produktivitas Usaha dan Keberlanjutan (Sustainability) Pekebun Kecil pada Industri Kelapa Sawit di Provinsi Riau (Studi pada Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau). *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 7, No. 1, Hal. 93-105.
- Tjahjono, H.K dan Hari Ardi. 2008. Kajian Niat Mahasiswa Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk Menjadi Wirausaha. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 16, No.1, Hal. 1-23.

### **Artikel Lain**

- Bygrave, William D and Mark Quill. 2007. Global Entrepreneurship Monitor: 2006 Financing Report. London: Babson Park, MA: London Business School and Babson College. *Report yang dipublikasikan*.

Ilyas, Supriyanto dan Ivan Gumilar. 2012. Pengaruh Persepsi Mahasiswa tentang Pendidikan Kewirausahaan terhadap Kepercayaan Diri dan Motivasi Mahasiswa Program Studi Akuntansi (Studi Kasus pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama). *Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis*. Bandung: Universitas Widyatama.

Soontornthum, Tanyaporn. 2007. The Effects of Government Assistance on The Entrepreneurs' Intention to Internationalize: An Empirical Study of Thai Entrepreneurs in Food Business. *Master of Science in Management, School of Management*. Shinawatra University, Disertasi yang dipublikasikan.

Xavier, Siri Roland, Samsinar Md Sidin, Ulrike Guelich, Catharina Nawangpalupi. 2016. ASEAN Regional Entrepreneurship Report 2015/2016. Kuala Lumpur: Universiti Tun Abdul Razak.

#### **Internet**

Fauzie, Yuliyanna. 2017. *Jumlah Penduduk Miskin Berkurang, tapi Kesenjangan Tinggi*. Diakses tanggal 10 Desember 2017 dari [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com).

Ikhsanti, Dyah. 2017. *Usaha Macet? Gunakan KUR untuk Menyelamatkan Bisnis Anda*. Diakses tanggal 25 April 2018 dari [www.aturduit.com](http://www.aturduit.com).

OECD Public Governance Reviews. 2016. *Open Government in Indonesia*. Diakses tanggal 12 Desember 2017 dari [www.oecd.org](http://www.oecd.org).

Rahayu, Ning. 2017. *Kewirausahaan akan jadi Program Prioritas Pemerintah*. Diakses tanggal 19 Desember 2017 dari [www.wartaekonomi.co.id](http://www.wartaekonomi.co.id).